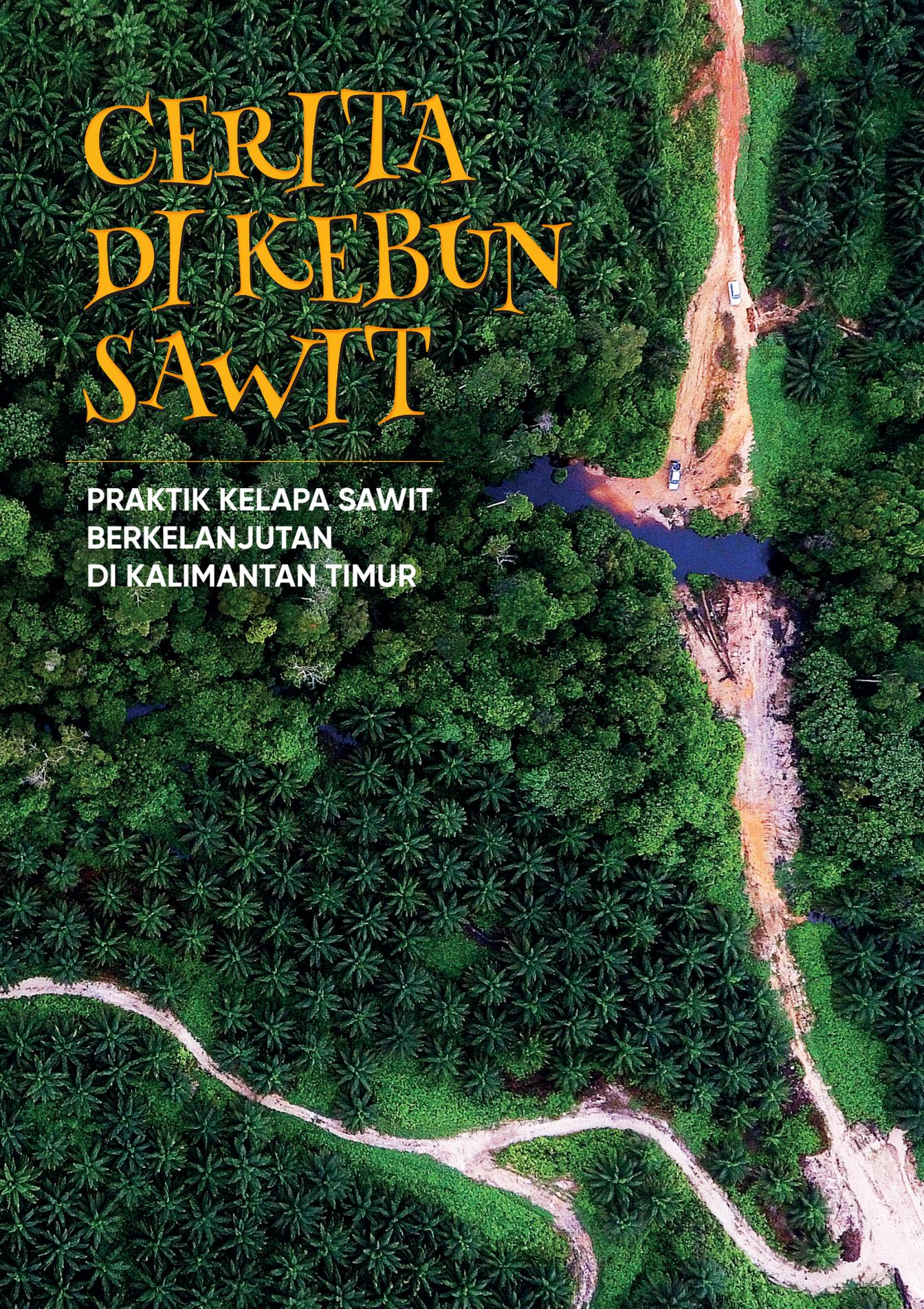


CERITA DI KEBUN SAWIT

**PRAKTIK KELAPA SAWIT
BERKELANJUTAN
DI KALIMANTAN TIMUR**



CERITA DI KEBUN SAWIT

PRAKTIK KELAPA SAWIT BERKELANJUTAN DI KALIMANTAN TIMUR

Copyright © Yayasan Konservasi Alam Nusantara, Published in 2022

PENULIS:

Wahyu Mulyono

EDITOR:

Jewelina Punuh

Bonifasius Parikesit

Iwied Wahyulianto

DESAIN & TATA LETAK:

Rifky

SITASI:

Yayasan Konservasi Alam Nusantara. 2022. Cerita di Kebun Sawit, Praktik Kelapa Sawit Berkelanjutan di Kalimantan Timur.

ISBN:

PENERBIT:

Yayasan Konservasi Alam Nusantara

Graha Iskandarsyah, Lt. 3

Jl. Iskandarsyah Raya No.66C, RT.3/RW.1,

Melawai, Kec. Kby. Baru, Kota Jakarta Selatan,

Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12160

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	3
DAFTAR SINGKATAN	5
KATA PENGANTAR KEPALA DINAS PERKEBUNAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR	7
KATA PENGANTAR KEPALA DINAS PERKEBUNAN KABUPATEN BERAU	9
KATA PENGANTAR PENASIHAT UTAMA GIZ UNTUK PELAKSANAAN PROYEK IKI-LEOPALD.	11
KATA PENGANTAR DIREKTUR EKSEKUTIF YAYASAN KONSERVASI ALAM NUSANTARA	13

KELAPA SAWIT BERKELANJUTAN BERMULA DI BERAU & KALIMANTAN TIMUR	15
Di Berau, Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Bermula	16
AWAL YANG BAIK	19
Dimulai dari Perencanaan Kebun yang Baik dan Basis Data yang Kuat	21
Perizinan yang Benar, Dasar Perkebunan Berkelanjutan	24
Kualitas Manusia, Dasar Kesuksesan	27
Mengurangi Risiko dan Mencari Solusi	28
BENTANG ALAM YANG TERJAGA, KUNCI SAWIT BERKELANJUTAN	31
Kriteria Bentang Alam Bernilai Konservasi Tinggi	32
Mengelola Batas-batas Bentang Alam Bernilai Konservasi Tinggi	35
MASYARAKAT DALAM PERKEBUNAN BERKELANJUTAN	39
Memetakan Lahan, Memetakan Manusia dan Perubahan	42
Negosiasi dan Mediasi Kunci Kelapa Sawit Berkelanjutan Bagi Masyarakat	43
MENJAGA KUALITAS, MENYEJAHTERAKAN MANUSIA	47
Pasokan Berkelanjutan dan Peningkatan Kesejahteraan	49
KERJA BERSAMA UNTUK KEBERLANJUTAN	53
KELAPA SAWIT BERKELANJUTAN DAN MASA DEPAN	55
DAFTAR PUSTAKA	57

DAFTAR SINGKATAN

ANKT	Area dengan Nilai Konservasi Tinggi
Aol	<i>Areas of interest</i>
APL	Area Penggunaan Lain
BMUV	<i>Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz/ The German Federal Ministry of the Environment, Nature Conservation, Nuclear Safety and Consumer Protection</i>
BP2SDLP	Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Sumberdaya Lahan Pertanian
BPN	Badan Pertanahan Nasional
BPS	Badan Pusat Statistik
CPI	<i>Climate Policy Initiative</i>
GIZ	<i>Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit</i>

HCV	<i>High Conservation Value</i>
HGU	Hak Guna Usaha
IKI	<i>International Climate Initiative</i>
IUP	Izin Usaha Perkebunan
Kaltim	Kalimantan Timur
KBNK	Kawasan Budidaya Non Kehutanan
KLHK	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
KLHS	Kajian Lingkungan Hidup Strategis
LEOPALD	<i>Low-emissions Oil Palm Development in Berau District, East Kalimantan</i>
Perbup	Peraturan Bupati
Perda	Peraturan Daerah
Pergub	Peraturan Gubernur
RPJMD	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
RPJMK	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung
RPJMN	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
RSPO	<i>Roundtable Sustainable Palm Oil</i>
RTGL	Rencana Tata Guna Lahan
RTRW	Rencana Tata Ruang Wilayah
SDM	Sumber Daya Manusia
SIPRAMA	Aplikasi Sistem Informasi Perkebunan Rakyat Mandiri
SK	Surat Keputusan
SOP	<i>Standard Operational Procedure</i>
STD-B	Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan untuk Budidaya
TBS	Tandan buah segar
UU	Undang-undang
YKAN	Yayasan Konservasi Alam Nusantara



Ir. Ujang Rachmad M, Si
Kepala Dinas Perkebunan Provinsi
Kalimantan Timur

Dalam rangka mewujudkan konsep Pembangunan Ekonomi Hijau dalam pembangunan sub sektor perkebunan, Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur menyadari bahwa untuk mengimplementasikan kebijakan ini memerlukan keterlibatan dan kolaborasi multipihak.

Oleh karena itu Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur dan Kabupaten/Kota memandang sangat penting untuk melakukan kolaborasi dengan mitra kerja pembangunan yang mempunyai visi dan program yang sama terkait pembangunan berkelanjutan. YKAN dan GIZ sebagai salah satu mitra kerja pembangunan sejak awal keberadaannya di Kalimantan Timur telah mendukung Pemerintah Indonesia dalam menjalankan program konservasi alam termasuk pembangunan perkebunan berkelanjutan dan rendah emisi.

Kolaborasi diawali dengan menyusun Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembangunan Perkebunan Berkelanjutan di Kalimantan Timur. Ditetapkannya Peraturan Daerah ini merupakan landasan hukum untuk mengimplementasikan konsep pembangunan perkebunan berkelanjutan dan selanjutnya disusun perencanaan program, kegiatan dan aktivitas lainnya sebagaimana yang diceritakan secara sistematis dalam buku kecil ini.

Saya mengapresiasi dan menyambut baik inisiatif Yayasan Konservasi Alam Nusantara yang telah menyusun dan mempublikasikan buku kecil (*booklet*) tentang: "Cerita Di Kebun Sawit: Praktik Kelapa Sawit Berkelanjutan di Kalimantan Timur". Buku kecil ini merupakan sumber informasi yang cukup valid tentang fakta sejarah, dimana keberadaan perkebunan, khususnya perkebunan kelapa sawit dan industri pengolahannya dapat dilakukan secara berkelanjutan.

Akhirnya, atas nama Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan Jajaran Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur saya menyampaikan ucapan terima kasih yang tulus kepada seluruh pimpinan YKAN, khususnya Tim Proyek *Low-emission Oil Palm Development* dan GIZ-LEOPALD yang telah menyelesaikan pekerjaan yang tidak mudah ini. Kami berharap YKAN juga GIZ akan tetap terus melahirkan inovasi-inovasi baru yang diperlukan untuk mengawal pembangunan perkebunan, khusus kelapa sawit berkelanjutan di Kalimantan Timur .

Samarinda, Juni 2022





Ir. Lita Handini

Kepala Dinas Perkebunan
Kabupaten Berau

Alhamdulillah puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena atas berkat Rahmat dan Hidayah-Nya maka buku kecil (*booklet*) tentang “Cerita Di Kebun Sawit: Praktik Kelapa Sawit Berkelanjutan di Kalimantan Timur” dapat diselesaikan dan dipublikasikan dengan baik.

Buku kecil ini memuat informasi tentang bagaimana pelaksanaan proyek “Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Rendah Emisi di Kabupaten Berau dan Kalimantan Timur” (*Low-emission Oil Palm Development/LEOPALD*) yang dilakukan oleh mitra-mitra pembangunan kami, yaitu *Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit* (GIZ) dan Yayasan Konservasi Alam Nusantara (YKAN) sejak tahun 2015 sampai dengan Juni 2022, dan juga menceritakan pembelajaran apa saja yang dapat dirangkum dari pelaksanaan proyek tersebut.

Sebagaimana diketahui pembangunan subsektor perkebunan tidak terlepas dari pemanfaatan sumber daya alam khususnya lahan dan hutan. Oleh karena itu, pembangunan subsektor

perkebunan juga harus mematuhi kaidah dan praktik pengelolaan, serta perlindungan kelestarian fungsi lingkungan hidup. Hal ini tercermin dari misi pertama dan kedua Bupati terpilih yang menekankan pemanfaatan potensi sumber daya alam secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Misi-misi ini juga diwujudkan di dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Berau tahun 2021-2026 yang menargetkan penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (emisi GRK) sebesar 2.239.353 karbon dioksida ekuivalen (CO₂e) khususnya di Area Penggunaan Lain (APL) termasuk peruntukan perkebunan.

Untuk mencapai target tersebut dan memastikan kegiatan pembangunan perkebunan berkelanjutan berjalan efektif, Pemerintah Kabupaten melalui Dinas Perkebunan berupaya menyusun strategi dan melakukan beragam kegiatan untuk mendorong pencapaiannya, salah satunya adalah dengan mengintegrasikan kegiatan proyek LEOPALD ini ke dalam dokumen perencanaan strategis Dinas Perkebunan dan dipayungi dengan perjanjian Kerjasama Teknis yang melibatkan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Berau (Baplitbang), Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur, GIZ dan YKAN sejak Juni 2017 dan diperpanjang lagi perjanjiannya pada Juni 2020.

Harapan kami, buku kecil ini bisa menjadi rujukan dan informasi terbaru bagi para pemangku kepentingan yang bekerja di sektor perkebunan berkelanjutan, khususnya di Berau yang sedang menyiapkan diri agar dapat mengimplementasikan pendekatan keberlanjutan berbasis yurisdiksi khususnya untuk komoditi perkebunan kelapa sawit.

Terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya disampaikan kepada jajaran Dinas Perkebunan, jajaran Badan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan, jajaran Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan, jajaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung, para perusahaan kelapa sawit yang sering berinteraksi dengan mitra pembangunan GIZ, dan YKAN, masyarakat kampung di sekitar perkebunan kelapa sawit, GIZ-LEOPALD, YKAN, serta semua pihak yang telah memberikan dukungan selama pelaksanaan proyek ini.

Semoga GIZ-LEOPALD dan YKAN akan tetap terus melahirkan inovasi-inovasi baru yang diperlukan untuk mengawal pembangunan perkebunan berkelanjutan dan mendukung kebijakan kampanye positif penerapan praktik perkebunan yang baik, khususnya perkebunan kelapa sawit di bumi Batiwakkal ini.

Tanjung Redeb, Juni 2022



Ade Cahyat

Penasihat Utama GIZ untuk pelaksanaan proyek IKI-LEOPALD.

“Cerita di kebun sawit: praktik kelapa sawit berkelanjutan di Kalimantan Timur” menyampaikan capaian-capaian dan pembelajaran yang didapatkan dari Kerja Sama “Pelaksanaan Pembangunan Kelapa Sawit Rendah Emisi dan Berkelanjutan di Provinsi Kalimantan Timur”. Kerja sama tersebut dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, Pemerintah Kabupaten Berau, Yayasan Konservasi Alam Nusantara (YKAN), dan *Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GmbH* (GIZ). GIZ menjadi bagian dari kerja sama berdasarkan penugasan yang diberikan oleh *International Climate Initiative* (IKI), *Federal Ministry for Environment Nature Conservation, Nuclear Safety and Consumer Protection* (BMUV) dan Perjanjian Pelaksanaan dengan Bappenas untuk proyek *Low-emissions Oil Palm Development in Berau District* (LEOPALD).

Dalam kerja sama tersebut, selain memberikan saran-saran kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, peran GIZ terfokus pada penguatan kapasitas (a) Pemerintah Kabupaten Berau untuk tata kelola lahan dan sektor perkebunan, dan (b) para pemangku kepentingan untuk mediasi konflik dan fasilitasi kemitraan antara masyarakat lokal dan pelaku usaha perkebunan di Kabupaten Berau. Peran GIZ tersebut merupakan bagian dari upaya untuk mewujudkan Kabupaten Berau sebagai daerah yang berkelanjutan dalam pengelolaan sektor perkebunan.

Kami berharap pembaca dapat menjadikan publikasi ini sebagai salah satu referensi dalam mengkaji tantangan, pendekatan, capaian, dan pembelajaran dalam rangka mewujudkan satu daerah yang berkelanjutan dalam tata kelola perkebunan sawit. Dokumentasi “cerita” ini hadir pada saat yang tepat dimana pendekatan keberlanjutan yurisdiksi diadopsi oleh semakin

banyak daerah-daerah penghasil komoditas perkebunan.

Kami menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada Bappenas, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, Pemerintah Kabupaten Berau, YKAN, dan seluruh pihak lain yang telah berkolaborasi dalam mencapai hasil-hasil bersama. Kami berharap, hasil-hasil bersama tersebut memadai untuk Pemerintah Kabupaten Berau melanjutkan proses transformasi sektor perkebunan berdasarkan Rencana Perkebunan Berkelanjutan Kabupaten Berau 2021-2045 yang telah disepakati bersama pemangku kepentingan. Predikat “daerah berkelanjutan” akan sangat bermanfaat bagi Kabupaten Berau, bukan hanya untuk memastikan optimalisasi dampak positif dan meminimalisir dampak negatif kegiatan perkebunan bagi masyarakat lokal dan lingkungan, tetapi juga penting untuk meningkatkan daya saing komoditas perkebunan daerah di pasar domestik dan global.



Herlina Hartanto, PhD.

Direktur Eksekutif

Yayasan Konservasi Alam Nusantara

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat rahmat dan karunia-Nya sehingga buku kecil (*booklet*) tentang “Cerita Di Kebun Sawit: Praktik Kelapa Sawit Berkelanjutan di Kalimantan Timur” ini dapat disusun dan diselesaikan dengan baik. Buku Kecil ini mengurai hasil-hasil yang telah dicapai dan pembelajaran yang didapatkan dari pelaksanaan Program Kerja Sama “Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Rendah Emisi dan Berkelanjutan di Kabupaten Berau dan Provinsi Kalimantan Timur.” Program Kerja Sama tersebut dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur diwakili oleh Dinas Perkebunan, Pemerintah Kabupaten Berau yang diwakili oleh Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan serta Dinas Perkebunan, Yayasan Konservasi Alam Nusantara (YKAN), dan *Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GmbH* (GIZ).

Yayasan Konservasi Alam Nusantara mendukung Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan Kabupaten Berau dalam membangun tata kelola sektor perkebunan yang lebih baik, khususnya perkebunan kelapa sawit dengan memfokuskan pada empat keluaran, yaitu: 1) Membangun instrumen-instrumen mitigasi dan kompensasi untuk sektor swasta; 2) Membangun sistem dan aplikasi untuk mendukung sistem pengelolaan data dan informasi bagi pemerintah daerah, khususnya Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur dan Kabupaten Berau; 3) Memperkuat kapasitas masyarakat di tingkat kampung melalui pendekatan "Aksi Inspiratif Warga untuk Perubahan (SIGAP)" di sektor perkebunan kelapa sawit; dan 4) Membentuk forum multipihak perkebunan berkelanjutan di Provinsi Kalimantan Timur dan Kabupaten Berau. Keseluruhan proses yang memakan waktu hampir tujuh tahun tersebut memerlukan investasi waktu, energi, dan kolaborasi multipihak serta menghadapi berbagai tantangan di lapangan.

Kami meyakini bahwa beragam capaian yang saat ini telah diraih akan sangat bermanfaat bagi para pelaku di sektor perkebunan dalam melaksanakan tata kelola perkebunan yang berkelanjutan. Besar harapan kami buku kecil ini

dapat menginspirasi para pembaca untuk terus memperkuat pengelolaan perkebunan berkelanjutan yang bukan saja menyejahterakan masyarakatnya, meningkatkan daya saing komoditas perkebunan di pasar global, tetapi juga memastikan fungsi sosial dan ekologi tetap berjalan seimbang sesuai dengan visi Kaltim Berdaulat.

Kami memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, Pemerintah Kabupaten Berau, *Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit* (GIZ) GmbH, Forum Komunikasi Perkebunan Berkelanjutan Provinsi Kalimantan Timur, Forum Komunikasi Perkebunan Berkelanjutan Kabupaten Berau, dan semua pihak yang telah mendedikasikan waktu, energi, data, keahlian, dan terlibat secara penuh dalam melaksanakan program kerja sama ini. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada *Federal Ministry for Environment Nature Conservation, Nuclear Safety and Consumer Protection* (BMUV) dan *Climate Initiative* (IKI) atas dukungan pendanaannya yang memungkinkan Provinsi Kalimantan Timur dan Kabupaten Berau membangun perkebunan yang berkelanjutan dan rendah emisi.

Jakarta, Juni 2022

KELAPA SAWIT BERKELANJUTAN BERMULA DI BERAU & KALIMANTAN TIMUR

Kalimantan Timur, Kabupaten Berau dan Potensi Perkebunan Sawit

Manusia dan alam tak pernah bisa terpisahkan. Sejatinnya, hidup bersama alam dan memanfaatkannya dengan bijak adalah nilai-nilai yang sejak dahulu telah dilakukan oleh nenek moyang kita, orang Indonesia.

Kalimantan, pulau terbesar ketiga di dunia ini terkenal sebagai pulau hijau dengan hamparan hutan hujan tropisnya yang memikat. Tak hanya memikat, namun di dalamnya tempat sumber kehidupan yang merupakan sumber plasma nutfah, keanekaragaman hayati yang tinggi, yang menopang kehidupan dan keseimbangan alam. Tak hanya untuk Kalimantan, namun juga untuk dunia.

Seiring perkembangan peradaban manusia, pembangunan membutuhkan ruang-ruang keberlangsungan hidup dengan beragam kebutuhan yang makin meluas. Salah satunya adalah ruang untuk perkebunan di antara belantara Borneo.

Kelapa sawit, salah satu komoditas perkebunan yang banyak dibutuhkan untuk berbagai keperluan dewasa ini. Untuk industri makanan, dengan beragam turunannya, seperti minyak goreng, bahan baku coklat, margarin dan makanan olahan lainnya. Untuk bahan kosmetik dan turunannya, seperti sabun, sampo, krim kulit, hingga pasta gigi. Kelapa sawit juga menjadi bahan baku bagi bahan bakar dan pelumas.

Sebagai produk nabati yang menjadi bahan baku mayoritas produk konsumsi masyarakat global, tak ayal kelapa sawit menjadi idola perkebunan. Indonesia menjadi salah satu produsen kelapa sawit terbesar di dunia. Kalimantan Timur adalah provinsi nomor empat terbesar dalam jumlah lahan kelapa sawit, setelah Riau, Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah.

Menurut data terakhir Badan Pusat Statistik (2021), provinsi Kalimantan Timur memiliki lahan perkebunan sawit sebesar 1,36 juta hektare. Luasan kebun kelapa sawit ini tersebar di seluruh wilayah administrasi Provinsi Kalimantan Timur. Tak hanya perusahaan besar swasta dan perusahaan besar negara (BUMN) yang menanam kelapa sawit, tetapi juga perkebunan rakyat dan plasma atau hasil kerja sama swasta dengan masyarakat.

Berau, salah satu kabupaten di Kalimantan Timur, mulai melirik

kelapa sawit sebagai komoditas andalan. Kabupaten yang selama beberapa dasawarsa mengandalkan pertambangan sebagai penggerak ekonominya itu, kini menjadikan kelapa sawit sebagai salah satu andalan perekonomian mereka. Data Badan Pusat Statistik Kalimantan Timur menyebutkan bahwa pada 2020 luasan kebun kelapa sawit di Kabupaten Berau mencapai 139.315 (Disbun Berau, 2021) hektare. Di tengah pro-kontra tanaman kelapa sawit dan permintaan dunia yang terus melonjak, industri sawit di Indonesia, khususnya di Kalimantan Timur dan Berau, kini terus menggeliat.

DI BERAU, PERKEBUNAN KELAPA SAWIT BERKELANJUTAN BERMULA

Mentari pagi terbit di ufuk timur Kabupaten Berau. Kabupaten paling Timur dari provinsi Kalimantan Timur ini mulai mentransformasi ekonominya dari industri ekstraktif menuju ke industri perkebunan. Alih-alih mengekstraksi sumber daya alam yang tidak berkelanjutan dan tidak ramah terhadap lingkungan, Pemerintah Kabupaten Berau di masa depannya ingin menggantungkan roda ekonomi mereka pada budi daya perkebunan.

Budi daya kelapa sawit menjadi sektor yang amat diandalkan. Pada kurun 2012-2018, luas lahan kelapa sawit meningkat pesat, dari 40 ribu hektare menjadi 120 ribu hektare. Tanaman kelapa sawit pun mendominasi 92% lahan pertanian

dan perkebunan di Kabupaten Berau. (CPI, 2018)

Dinas Perkebunan Kabupaten Berau juga mencatat pertumbuhan industri kelapa sawit yang pesat dan menyerap tenaga kerja yang besar. Tercatat, pada 2012, sekitar 3 ribu orang bekerja di industri kelapa sawit. Hanya berselang dua tahun, yakni pada 2014, jumlah orang yang bekerja pada industri ini mencapai 21 ribu orang.

Tidak heran jika Pemerintah Kabupaten Berau memandang kelapa sawit sebagai komoditas penting. Namun, Berau tidak ingin industri kelapa sawit yang ada di wilayahnya sekadar besar dan luas, melainkan dikelola dengan menjaga sumber daya alam yang ada. Dengan kata lain, mempraktikkan perkebunan kelapa sawit yang rendah emisi dan sumber daya alam bernilai tinggi yang ada tetap terjaga.

Niat Berau untuk menghasilkan kelapa sawit berkelanjutan yang rendah emisi ini didukung oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Kalimantan Timur No. 7 tahun 2018 tentang Pembangunan Perkebunan Berkelanjutan mendukung pemerintah kabupaten dalam mengembangkan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan. Perda ini menyebutkan bahwa pembangunan perkebunan harus dilakukan secara



berkelanjutan dari sisi produksi, ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup.

Pemerintah Kabupaten Berau pun kemudian memperkuat komitmennya dalam mengembangkan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan. Hasilnya adalah Perda No 3 tahun 2020 tentang Pembangunan Perkebunan Berkelanjutan.

Di sinilah, di Berau, awal mula perkebunan kelapa sawit berkelanjutan di Kalimantan Timur berlangsung.



AWAL YANG BAIK

Yayasan Konservasi Alam Nusantara (YKAN) berdiri sejak 2014 merupakan organisasi nirlaba di bidang konservasi dan menjadi mitra utama The Nature Conservancy (TNC) yang pernah bekerja di Indonesia mulai tahun 1991. Sebagai mitra utama, YKAN melanjutkan program konservasi TNC yang telah berhenti beroperasi di Indonesia sejak Maret 2020. Membawa misi melindungi daratan dan perairan yang menjadi penyangga kehidupan, YKAN mendukung Pemerintah Indonesia menjalankan strategi kehutanan berkelanjutan dan rendah emisi, dengan berlandaskan kajian ilmiah, serta menekankan kolaborasi multipihak antara pemerintah, korporasi dan masyarakat dalam bentuk kemitraan yang selaras.

Hutan tropis Indonesia, selain memiliki tingkat keanekaragaman hayati yang tinggi, merupakan hutan tropis terluas ketiga setelah Brazil dan Kongo. Kalimantan, pulau terbesar ketiga di dunia ini adalah salah satu pulau

yang memiliki hutan hujan tropis alami. Namun, tutupan hutan terus berkurang akibat pengalihfungsian lahan dan pengelolaan sumber daya yang tidak berkelanjutan.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menyadari bahwa tuntutan pembangunan untuk menggerakkan perekonomian dan kebutuhan agar kelestarian sumber daya alam tetap terjaga perlu diseimbangkan. Sebagai provinsi dengan lahan perkebunan kelapa sawit keempat terluas di Indonesia, Kalimantan Timur mengatur langkah menuju penerapan perkebunan kelapa sawit yang berkelanjutan.

YKAN atas dukungan Kementerian Perlindungan Konsumen, Keamanan Nuklir, Konservasi Alam dan Lingkungan Hidup Jerman (BMU-IKI), bersama mitranya di Kalimantan Timur yaitu *Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GmbH* (GIZ) dan *Climate Policy Initiative* (CPI) mendampingi Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten Berau merintis perkebunan kelapa sawit berkelanjutan selama tujuh tahun, sejak 2015 hingga 2022. YKAN mendukung penerapan praktik perkebunan kelapa sawit berkelanjutan karena mampu mengurangi laju kerusakan hutan dan lahan, serta menekan emisi karbon.

Sekitar 75 persen dari total wilayah Berau atau sekitar 1,6 juta hektare masih berupa hutan.

Kawasan area konservasi milik PT Mulia Inti Perkasa.

© YKAN2020



Karena sebagian besar lahan yang memenuhi syarat untuk pengembangan perkebunan sawit masih berupa hutan primer dan sekunder, maka jika kawasan tersebut terkonversi akan menghasilkan hingga 60 juta ton emisi karbon hutan (CPI, 2018). Perkebunan kelapa sawit berkelanjutan dapat mengurangi dampak tersebut, sekaligus menjaga kawasan-kawasan bernilai konservasi tinggi.

Program kerja selama tujuh tahun ini menyatukan lembaga pemerintah, sektor swasta, kelompok masyarakat dan petani untuk mengembangkan dan mengimplementasikan program kelapa sawit berkelanjutan di tingkat kabupaten. Program ini menunjukkan bahwa pengembangan perkebunan kelapa sawit dapat dilakukan secara bertanggung jawab dalam skala besar. Salah satu capaian penting dalam program ini, adalah lahirnya Peraturan Daerah Kalimantan Timur Nomor 7 tahun 2018 tentang Pembangunan Perkebunan Berkelanjutan. Beleid ini, menjadi panduan dalam implementasi perkebunan berkelanjutan untuk seluruh kabupaten dan kotamadya di Kalimantan Timur.

DIMULAI DARI PERENCANAAN KEBUN YANG BAIK DAN BASIS DATA YANG KUAT

Pembangunan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan tidak akan terwujud jika tak diawali dengan perencanaan yang

baik. Perencanaan kebun yang baik akan terwujud jika semua pihak, apalagi pemerintah sebagai regulator, memiliki data yang kuat. Ini yang menjadi pondasi perkebunan kelapa sawit berkelanjutan.

Perencanaan perkebunan yang baik dimulai dari sumber data yang akurat dan terkini. Salah satunya adalah data geospasial berbasis web atau daring (*online*). Data geospasial berbasis web ini akan memberikan informasi tentang luasan kebun termasuk batas-batasnya dan mengetahui status perizinan kebun masih berlaku atau tidak. Selain itu, di ranah provinsi dan kabupaten, data geospasial juga memberikan informasi tentang kondisi kebun, bilamana kebun dalam kondisi terbakar atau tidak.

Data geospasial ini juga yang akan menjadi acuan dalam pengembangan program Kebijakan Satu Peta atau *One Map Policy* baik di Provinsi Kalimantan Timur maupun di Kabupaten Berau. Kebijakan Satu Peta sangat penting dan menjadi kebutuhan mendesak terutama di era otonomi daerah saat ini.

Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten memerlukan data spasial yang terintegrasi secara lintas sektoral, yaitu kehutanan, perkebunan, pertanian dan pertambangan. Data geospasial yang terpusat ini diperlukan dalam melakukan perencanaan wilayah pembangunan, khususnya yang berbasis

lahan. Dengan demikian, perencanaan pembangunan menjadi lebih akurat, tidak terjadi tumpang tindih kebijakan maupun kepentingan.

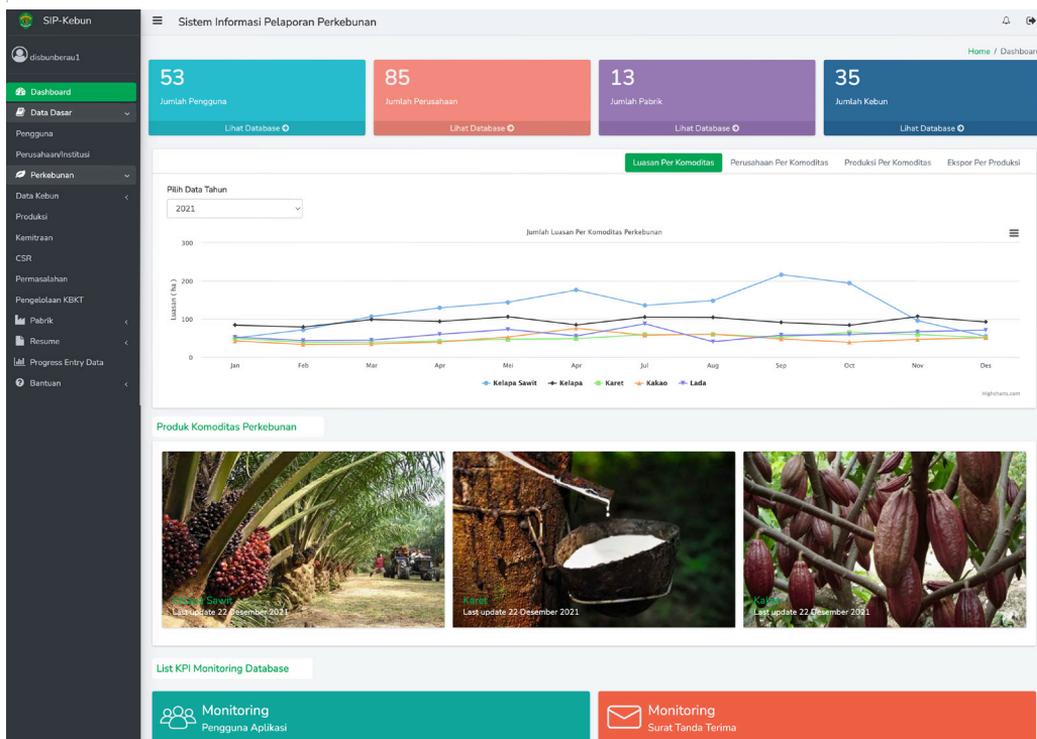
YKAN bersama GIZ melihat sistem pelayanan berbasis teknologi informasi dan daring memainkan peranan penting dalam pengelolaan sumber daya kehutanan, termasuk perkebunan kelapa sawit. Sistem ini juga sangat mendesak untuk segera diaplikasikan.

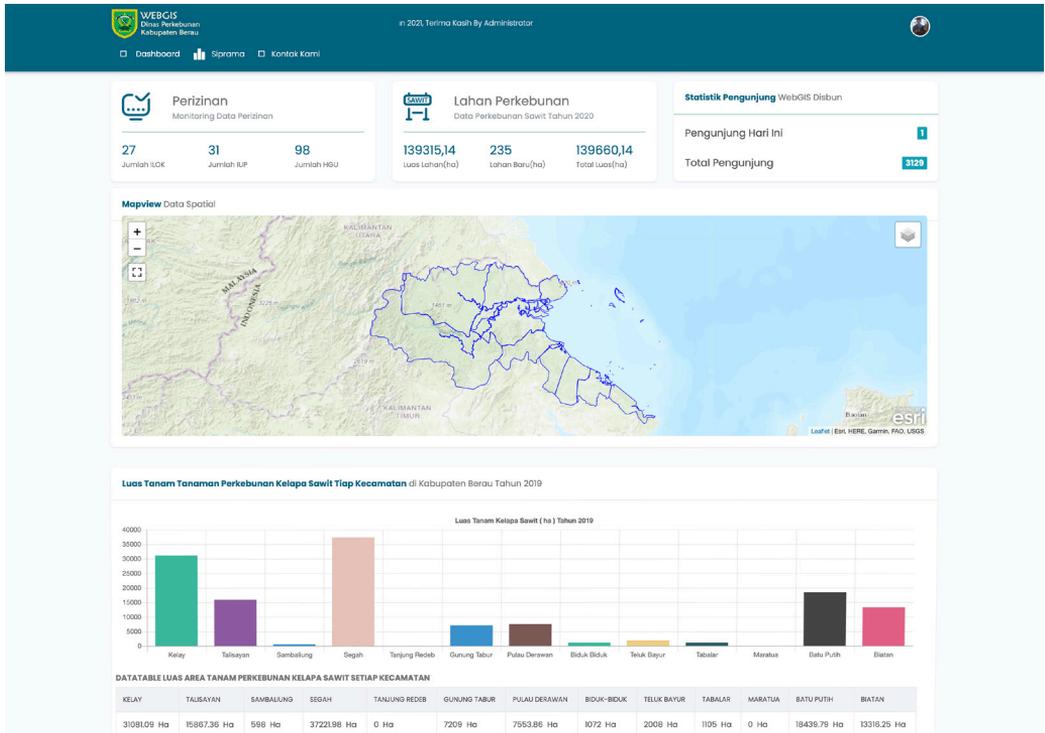
Untuk mendukung perencanaan yang baik dengan pelayanan berbasis teknologi informasi dan daring inilah maka YKAN dan GIZ memberikan pelatihan guna penguatan, baik

teknologi maupun sumber daya manusianya. YKAN dan GIZ mendukung 24 pelatihan tentang pengelolaan data dan web geospasial, pemantauan tutupan lahan dan penggunaan aplikasi analisis spasial kesesuaian lahan Pratinjau.

YKAN dan GIZ juga melakukan penguatan kapasitas sistem Satu Data yang ada. Kegiatan dilakukan melalui perbaikan proses kerja dengan menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP), termasuk kebijakan dan tata kelolanya. Dukungan juga dilakukan dalam pengembangan aplikasi digital dan melatih pemegang jabatan yang terlibat dalam proses kerja baru sesuai SOP.

Tampilan website Sistem Informasi Pelaporan Perkebunan Kabupaten Berau, Kalimantan Timur.





Tampilan webGIS Dinas Perkebunan Kabupaten Berau, Kalimantan Timur.

Selama ini terbatasnya data spasial dan tidak transparan menyebabkan banyak permasalahan dalam perizinan pengelolaan sumber daya alam, khususnya yang berbasis ruang. Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat menyebabkan kerugian berupa tumpang tindih data dan waktu yang terbuang untuk menyamakan hasil analisis.

Tumpang tindih data ini, berimbas pada tumpang tindihnya perizinan untuk sektor-sektor berbasis lahan. Hal ini tentunya akan meningkatkan jumlah konflik tenurial di Kalimantan Timur, khususnya di Kabupaten Berau. Akibatnya, kualitas pelayanan aparatur berpotensi menurun di dinas terkait

karena membengkaknya waktu untuk menangani konflik di masyarakat dan perusahaan.

Data geospasial berbasis web ini tak hanya mendata perusahaan besar baik swasta maupun perusahaan negara, melainkan juga petani sawit mandiri yang mengelola lahan kurang dari 25 hektare. Dengan program SIPRAMA atau Sistem Informasi Perkebunan Rakyat Mandiri, data lahan dari petani rakyat kini juga tersedia. Dengan demikian, semua data lahan perkebunan sawit terpetakan dengan lengkap, baik dari yang puluhan, ratusan atau ribuan hektare. Data inilah yang sangat dinantikan untuk mewujudkan

pembangunan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan di Berau, maupun di Kalimantan Timur secara keseluruhan.

Hasil dari program data geospasial perkebunan berbasis web ini, bisa diakses oleh multipihak di web geospasial dinas perkebunan Provinsi Kalimantan Timur. WebGIS Perkebunan adalah atlas yang menampilkan peta kawasan perkebunan yang ada. Peta ini bisa diakses oleh semua pihak, khususnya bagi perusahaan atau perorangan yang akan melakukan investasi di bidang perkebunan. Cukup dengan akses internet, dapat diketahui area mana yang diperbolehkan untuk membuka kebun kelapa sawit. Dengan WebGIS, waktu menjadi efisien, dimana sebelumnya perusahaan atau pengusaha harus bolak-balik ke kantor kehutanan di Jakarta, hanya mengurus apakah suatu area diperbolehkan atau tidak jika dibuka untuk area kebun.

PERIZINAN YANG BENAR, DASAR PERKEBUNAN BERKELANJUTAN

Kontribusi industri kelapa sawit bagi sektor ekonomi memang signifikan. Karena itu pembangunan perkebunan berkelanjutan yang rendah emisi harus memastikan manfaat untuk masyarakat dapat dinikmati dalam jangka waktu panjang. Dengan perizinan yang benar maka jumlah konflik tenurial akan menurun dan area dengan nilai konservasi tinggi tetap terjaga.



Dalam hal ini perizinan menjadi salah satu dasar keberlangsungan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan. Dengan adanya data geospasial berbasis daring yang menjadi acuan satu data untuk lintas sektoral berbasis lahan, maka perizinan akan lebih mudah dilakukan dan lebih terpantau.

Untuk memastikan perizinan perkebunan kelapa sawit tidak tumpang



Area konservasi ini termasuk bagian dari area tujuh bukit yang ada di PT Malindomas Perkebunan.

tindih, maka sebuah aplikasi berbasis daring diluncurkan oleh Pemerintah Kabupaten Berau, bekerja sama dengan YKAN dan GIZ. Aplikasi Pratinjau perizinan ini dikembangkan dengan tujuan mempermudah proses analisis permohonan izin secara sederhana, cepat, dan daring.

Aplikasi Pratinjau menggunakan data dari masing-masing wali data, yaitu

organisasi perangkat daerah di lingkup Pemerintah Kabupaten Berau, instansi terkait, serta sumber-sumber lain yang relevan. Data ini dikelola dan disimpan pada portal data Berau.

Adasembilan data yang digunakan dalam Aplikasi Pratinjau ini. Di antaranya adalah data peta tata ruang wilayah kabupaten (RTRW-K) dari Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang; data peta penetapan

perkebunan dan data peta indikatif area bernilai konservasi tinggi. Terakhir adalah data peta rencana tata guna lahan kampung dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Kampung.

Kendati hasil analisis aplikasi ini bukan merupakan dokumen perizinan, tetapi dapat memberikan gambaran awal lokasi yang dimohonkan. Ia juga memuat saran tindak lanjut dari permohonan yang diajukan melalui Dinas Penanaman Modal & Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Kabupaten Berau.

Oleh karena itu, pengaju izin harus tetap mengikuti peraturan tentang pemberian izin yang berlaku berdasarkan jenis izin. Komitmen ini harus dipenuhi oleh setiap pengusaha atau pengaju izin perkebunan sawit di Berau.

Aplikasi pratinjau yang dibangun sejak 2020 ini akan sangat membantu pengusaha atau investor saat akan mengajukan izin usaha. Aplikasi ini membantu pengguna memperoleh informasi awal mengenai lokasi yang dimohonkan.

Pengaju izin juga akan mendapatkan informasi tentang lokasi yang diusulkan dalam sejumlah kondisi, seperti : berada pada pola ruang apa, berdasarkan data RTRW K/P; berada pada status kawasan hutan atau nonhutan berdasarkan data kawasan hutan; ada tumpang tindih dengan izin yang telah ada atau

tidak pada data izin eksisting; memiliki tutupan lahan berupa apa berdasarkan data penutupan lahan terbaru; dan kelas kesesuaian lahan yang diusulkan. Jika ternyata ada masalah, maka pengaju akan mendapatkan informasinya secara aktual dan potensial dalam bentuk luasan lahan.

Terakhir, pengaju juga bisa mengetahui apakah lokasi yang diusulkan ada yang masuk ke dalam peta indikatif Area dengan Nilai Konservasi Tinggi (ANKT). Jika ada berapa luasnya dan akan disebutkan bahwa pengaju perlu melakukan kajian di tingkat tapak.

Penggunaan Aplikasi Pratinjau untuk kebun sawit berkelanjutan telah diterapkan oleh Pemerintah Kabupaten Berau. Bahkan, aplikasi ini memiliki payung hukum dengan lahirnya Surat Keputusan Bupati Berau No. 213 Tahun 2021 tentang Pengelolaan dan Penggunaan Aplikasi Pratinjau Usulan Perizinan Berbasis Lahan.

Penggunaan Aplikasi Pratinjau ini dapat diduplikasikan di kabupaten dan kota lainnya yang ada di Kalimantan Timur. Selain membantu pemerintah daerah dalam mengeluarkan perizinan, aplikasi pratinjau ini sangat membantu pengusaha atau investor saat hendak membuka usaha perkebunan kelapa sawit berkelanjutan di Kalimantan Timur.

KUALITAS MANUSIA, DASAR KESUKSESAN

Bukan hanya dua perangkat berbasis daring yang dihasilkan dari kerja bersama Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dengan YKAN beserta mitranya. Terdapat dua perangkat aplikasi berbasis daring lain yang sangat membantu terlaksananya perkebunan sawit berkelanjutan di Kalimantan Timur. Yaitu aplikasi Sistem Informasi Pelaporan (SIP) Perkebunan dan Surat Persetujuan Penyaluran Benih Kelapa Sawit (SP2BKS).

SIP Perkebunan adalah pengembangan sistem pelaporan perkebunan secara daring. SIP Perkebunan mendigitalisasi proses pelaporan berbasis kertas yang selama ini dilakukan perusahaan ke Dinas Perkebunan. Proses ini memudahkan kerja perusahaan dan pemerintah daerah. Dampaknya adalah

Dinas Perkebunan kini memiliki data yang terstandarisasi dari apa yang dilaporkan perusahaan dan dinas di tingkat kabupaten maupun provinsi sehingga memudahkan pengawasan.

Sementara SP2BKS merupakan sistem yang dibangun untuk melakukan pelacakan atas benih dalam format website. Keberadaan SP2BKS berbasis web, membuat pelayanan untuk mendapatkan benih kelapa sawit menjadi lebih cepat.

Tentu, seluruh perangkat yang mendukung perkebunan berkelanjutan ini membutuhkan dukungan sumber daya manusia yang terampil dan memiliki kapabilitas untuk dapat mendayagunakannya secara optimal. Menyadari hal tersebut, sejak ketiga

Seorang pekerja sedang melakukan pemupukan di salah satu perusahaan perkebunan kelapa sawit.

©YKAN2020



sistem berbasis web ini dikembangkan pada 2018, beragam pelatihan diberikan kepada semua pihak yang akan menggunakannya.

Pada 2018, pelatihan sistem informasi geospasial perkebunan berbasis web untuk kabupaten dan kota di provinsi Kalimantan Timur dilakukan oleh YKAN, dengan Kabupaten Berau sebagai percontohan atau piloting project. Pada tahun yang sama, pelatihan SP2BKS dan SIP-Kebun juga dilakukan. Di tingkat provinsi dan kabupaten, peserta pelatihan berasal dari Dinas Perkebunan, Dinas Lingkungan Hidup, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Penanaman Modal & Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional.

Tak hanya itu, bahkan pada 2021 dengan biaya dari Dinas Perkebunan, diadakanlah pelatihan untuk perusahaan agar terampil menggunakan keseluruhan aplikasi yang akan menunjang pembangunan perkebunan berkelanjutan tersebut.

Selama program berlangsung, total 31 kegiatan peningkatan kapasitas dengan tiga topik utama, yaitu Data Manajemen, Perencanaan Perkebunan serta Konflik Manajemen dan Negosiasi. Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan tersebut berjumlah 536 orang. Mereka berasal dari organisasi perangkat daerah sebanyak 264 orang,

127 orang masyarakat, 109 orang swasta dan 36 orang lembaga swadaya masyarakat (CSO).

YKAN berharap dengan adanya kemudahan dari sistem yang telah terbangun ini, maka pemerintah daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten dapat berkomitmen untuk menjaga hasil yang telah dicapai sejak 2017.

MENGURANGI RISIKO DAN MENCARI SOLUSI

Data spasial mengenai luasan dan batas-batas kebun yang terdokumentasi dengan baik serta sistem data satu atap tentunya memudahkan pengelolaan perkebunan berkelanjutan. Hal ini juga membantu pemerintah dalam mengontrol praktik perkebunan berkelanjutan di lapangan. Termasuk di dalamnya pengelolaan kawasan dengan nilai konservasi tinggi, atau biasa disebut Area dengan Nilai Konservasi Tinggi (ANKT) di kawasan perkebunan kelapa sawit.

Untuk menciptakan pembangunan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan, sejak 2005 *Roundtable Sustainable Palm Oil* (RSPO) mengeluarkan sebuah kriteria agar anggotanya mendapatkan sertifikat keberlanjutan. Selain RSPO, standar lainnya adalah *Indonesian Sustainable Palm Oil* (ISPO), yang telah menjadi standar wajib bagi para pengusaha perkebunan. Menjadi anggota RSPO dan



ISPO berarti perusahaan tersebut telah mendapatkan sertifikasi bahwa mereka menerapkan praktik perkebunan kelapa sawit yang berkelanjutan.

Prinsip dan kriteria RSPO 7.3 menyatakan bahwa penanaman baru sejak November 2005 tidak dilakukan di hutan primer atau setiap area yang dipersyaratkan untuk memelihara atau meningkatkan satu atau lebih nilai konservasi Tinggi.

Prinsip dan kriteria 7.3 dimaksudkan untuk melestarikan keanekaragaman hayati, serta jasa dan nilai lingkungan, dan sosial budaya yang penting. Prinsip ini juga menjaga wilayah-wilayah yang diperlukan untuk memeliharanya dalam konteks perluasan budi daya kelapa sawit.

Kendati telah ada prinsip dan kriteria 7.3 bagi anggota RSPO, namun kenyataannya masih terjadi pembukaan lahan kelapa sawit oleh anggotanya yang dilakukan tanpa didahului dengan penilaian ANKT. Karena itulah RSPO memilih untuk mengembangkan prosedur remediasi dan kompensasi.

Prosedur remediasi dan kompensasi ini dibuat untuk mengidentifikasi potensi kehilangan hutan primer atau ANKT yang disebabkan oleh pengembangan penanaman baru. Kompensasi diwajibkan bagi semua pembukaan lahan setelah November 2005 yang dilakukan tanpa kajian ANKT. Inilah salah satu prosedur untuk mengurangi risiko kehilangan bentang alam yang bernilai konservasi tinggi serta

mencari solusi atas kesalahan yang telah dilakukan.

YKAN mendukung pemerintah Provinsi Kalimantan Timur mengembangkan sebuah instrumen bernama *Compensation Support Facility (CSF)*. Instrumen berbasis web data spasial ini membantu perusahaan mengukur luasan lahan yang menabrak rambu-rambu prinsip 7.3 RSPO.

Instrumen CSF dapat membantu seluruh perusahaan perkebunan kelapa sawit yang berencana melakukan kalkulasi *liabilities* (kewajiban) maupun melakukan kompensasi, bagi perusahaan yang menjadi anggota RSPO. Dengan demikian, perusahaan dapat menilai besaran kompensasi yang mereka harus keluarkan.

Seperti diketahui, ada dua pilihan untuk memenuhi kewajiban konservasi atau kompensasi ini. Pertama, lahan yang sama dengan kewajiban akhir konservasi, dikelola perusahaan dan atau pihak ketiga. Tujuan utama adalah melestarikan keanekaragaman hayati di dalam ataupun di luar kawasan yang dikelola oleh perusahaan tersebut. Kedua, perusahaan memberikan pendanaan kepada pihak ketiga untuk proyek-proyek atau program yang mendukung pencapaian tujuan konservasi di luar kawasan yang dikelola perusahaan tersebut. Nilai keseluruhan pendanaan tersebut sama dengan



Elang wallace (*Nisaetus nanus*) merupakan salah satu jenis burung pemangsa dengan sebaran terbatas di Sunda Besar (Semenanjung Malaysia, Sumatra dan Kalimantan); mendiami hutan dataran rendah dengan kondisi baik, walau terkadang dapat ditemui di tepi hutan primer dan hutan sekunder yang berbatasan dengan hutan primer.

©YKAN2020

kewajiban akhir konservasi dalam jumlah hektare dikalikan dengan nilai 2.500 Dolar Amerika.

Kompensasi atau kewajiban konservasi ini dapat dilakukan di wilayah Perhutanan Sosial, Kawasan Ekosistem Esensial dan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH). Karena itu YKAN juga menyusun katalog kompensasi yang menyediakan informasi kawasan yang dapat menjadi tempat untuk melakukan kompensasi bagi perusahaan. Katalog kompensasi tersebut berisi tentang informasi ketiga wilayah tersebut, sehingga perusahaan menjadi terbantu.

BENTANG ALAM YANG TERJAGA, KUNCI SAWIT BERKELANJUTAN

Mengelola Bentang Alam yang Bernilai
Konservasi Tinggi

Pembangunan perkebunan yang memperhatikan aspek ekonomi, sosial budaya, dan ekologi adalah penjabaran dari praktik perkebunan kelapa sawit berkelanjutan. Praktik ini dapat menyelaraskan kebutuhan industri dan ekonomi, dengan tanpa menegasikan kelestarian sumber daya alam.

Berau merupakan kabupaten di Kalimantan Timur yang memiliki hamparan hutan hujan dataran rendah terluas di provinsi tersebut. Pertumbuhan perkebunan kelapa sawit yang pesat di Berau menuntut adanya konsistensi dalam menaati kaidah dan praktik pengelolaan dan perlindungan kelestarian fungsi lingkungan hidup.

Oleh karena itu, pengelolaan dan perlindungan ANKT di wilayah konsesi perusahaan perkebunan kelapa sawit menjadi keharusan. ANKT adalah lahan atau hamparan area yang memiliki nilai penting dan signifikan secara biologis,

ekologis, sosial dan/atau kultural. Area ini memiliki nilai sangat penting, baik di tingkat dunia, nasional, daerah maupun di tingkat tapak.

Pengelolaan ANKT bertujuan menjaga, mencegah dan membatasi kegiatan yang dapat menyebabkan kepunahan jenis tumbuhan dan satwa. Termasuk di dalamnya mencegah terjadinya konflik antara manusia dan satwa liar. Pengelolaan ANKT juga dilakukan untuk memelihara keseimbangan dan kemantapan ekosistem yang penting atau esensial, terintegrasi untuk area budi daya perkebunan kelapa sawit.

Tujuan lain dari pengelolaan ANKT adalah menjamin kelestarian fungsi dan manfaat sumber daya hayati serta ekosistem bagi generasi kini dan akan datang. Penerapan pengelolaan ANKT ini juga memelihara keselarasan kehidupan dengan masyarakat yang berada di dalam dan sekitar area perkebunan kelapa sawit.

Yang tak kalah penting adalah menjaga hak perorangan, masyarakat dan negara atas potensi kawasan, ekosistem dan investasi di dalam area budi daya perkebunan. Di samping itu pula agar bisa memanfaatkan sumber daya alam secara lestari untuk kehidupan masyarakat.

Dengan mengelola ANKT, bentang alam akan terjaga. Ini sejalan dengan kesepakatan yang ditandatangani

tujuh kepala daerah yang mewakili seluruh kabupaten di Kalimantan Timur pada 27 September 2017. Mereka menandatangani komitmen pengembangan perkebunan berkelanjutan yang dilakukan pada site event dalam acara pertemuan Satuan Tugas Gubernur untuk Hutan dan Iklim atau *Governor's Climate and Forest-Task Force* (GCF-Task Force) di Balikpapan, Kalimantan Timur. Salah satu poin yang disepakati adalah perlindungan area bernilai konservasi tinggi (ANKT) seluas 640 ribu hektare. Pemerintah provinsi menilai penting untuk mempertahankan kawasan berhutan dan lahan gambut di dalam area peruntukan perkebunan, sebagai bagian dari penerapan prinsip perkebunan berkelanjutan

KRITERIA BENTANG ALAM BERNILAI KONSERVASI TINGGI

Bentang alam, secara istilah adalah suatu entitas geografis, terdiri atas mosaik-mosaik tata guna lahan yang saling berinteraksi. Di dalamnya terdapat energi, material, organisme dan institusi yang berpadu untuk memberikan manfaat ekologis, sosial, ekonomi dan budaya dalam kehidupan.

Sejak 2015, YKAN bersama mitra dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, yang difasilitasi oleh Forum Komunikasi Perkebunan Berkelanjutan Provinsi Kalimantan Timur, bekerja sama melindungi bentang alam bernilai konservasi tinggi ini. Hasilnya adalah



Salah satu hamparan ANKT pada perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Berau, Kalimantan Timur.

©YKAN2020

dua peraturan gubernur tentang Area dengan Nilai Konservasi Tinggi (ANKT) di kawasan perkebunan yang lahir di tahun 2021.

Pertama adalah Peraturan Gubernur No. 12 tahun 2021 tentang Kriteria Area Dengan Nilai Konservasi Tinggi. Kedua adalah Peraturan Gubernur No 43 tahun 2021 tentang Pengelolaan Area Dengan Nilai Konservasi Tinggi di Area Perkebunan.

Penetapan kriteria ANKT ini menjadi panduan dalam mengidentifikasi dan menginventarisasi area yang memiliki nilai penting dan signifikan secara

biologis, ekologis, sosial dan/atau kultural pada area perkebunan. Tujuan penetapan kriteria ini untuk pembuatan dan penetapan peta indikatif ANKT. Peta ini akan menjadi dasar bagi pelaku usaha perkebunan untuk mengelola kawasan terindikasi ANKT di dalam kebun mereka.

Sesuai dengan peraturan gubernur, di Kalimantan Timur ditetapkan enam jenis dan kriteria ANKT. Enam jenis dan kriteria ini disarikan dari *High Conservation Value Resource Network* (HCVRN) yang kemudian dituangkan dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Timur tentang Kriteria ANKT.

HCVRN adalah lembaga global yang mengeluarkan lisensi bagi penilai ANKT.

Nilai konservasi tinggi menurut HCVRN adalah nilai biologis, ekologis, sosial dan/atau budaya yang memiliki signifikansi luar biasa atau sangat penting. Enam jenis dan kriteria ANKT ini adalah ANKT 1 tentang keragaman spesies, ANKT 2 tentang ekosistem dan mosaik tingkat lanskap, ANKT 3 tentang ekosistem dan habitat, ANKT 4 tentang jasa-jasa ekosistem, ANKT 5 tentang kebutuhan masyarakat dan ANKT 6 tentang nilai-nilai budaya.

ANKT 1 tentang keragaman spesies secara sederhana adalah area yang

memiliki konsentrasi keanekaragaman hayati, termasuk spesies endemik dan spesies langka, yang masuk kategori terancam atau terancam punah, diakui unik atau luar biasa. Kondisi tersebut signifikan pada tingkat global, regional, atau nasional.

ANKT 2 tentang ekosistem dan mosaik tingkat lanskap adalah area yang mencakup ekosistem dan mosaik ekosistem yang cukup besar dengan lanskap hutan utuh. Kawasan ini secara relatif belum terganggu, sehingga bisa mendukung populasi yang layak dari sebagian besar spesies alami, serta mayoritas nilai-nilai lingkungan yang muncul di dalam ekosistem terkait.

ANKT 3 tentang ekosistem dan habitat adalah area yang mencakup ekosistem, habitat atau refugia (tempat berlindung) yang memiliki peranan penting. Peranan penting ini dikarenakan kelangkaannya atau tingkat ancaman yang dihadapinya atau komposisi spesiesnya yang langka atau unik atau karakteristik lainnya.

ANKT 4 tentang jasa-jasa ekosistem adalah area di mana jasa ekosistem dasar dalam situasi kritis. Termasuk di dalamnya adalah daerah tangkapan dan perlindungan air, serta kontrol terhadap erosi pada tanah dan lereng yang rentan.

ANKT 5 tentang kebutuhan masyarakat adalah area yang mengacu pada situs dan sumber daya yang fundamental

Kangkareng perut-putih (*Anthracoceros albirostris*) yang berada di salah satu kawasan ANKT perusahaan perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Berau, Kalimantan Timur.

©YKAN2020



dalam memenuhi kebutuhan dasar bagi masyarakat lokal.

Terakhir, ANKT 6 tentang nilai-nilai budaya, adalah area yang memiliki sumber daya, habitat dan lanskap dengan nilai budaya global dan nasional. Memiliki signifikansi arkeologis atau historis dan/atau kepentingan kultural, ekologis, ekonomi atau religius/sakral yang kritis bagi kebudayaan tradisional untuk masyarakat asli atau lokal. Hal ini diidentifikasi dengan cara terlibat langsung bersama masyarakat asli atau lokal tersebut.

Peraturan Gubernur Kalimantan Timur ini diharapkan membuat pembangunan perkebunan kelapa sawit dapat dilaksanakan secara menyeluruh dan konsisten. Untuk ke depannya, dapat memberikan manfaat ekonomi yang optimal bagi pelaku usaha.

Tak hanya itu, masyarakat dan daerah juga akan mendapat keuntungan, serta mendapatkan manfaat sosial. Tak kalah penting adalah adanya kepastian bagi perlindungan kelestarian lingkungan hidup.

YKAN, GIZ dan mitra lokal lainnya bersama pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten meyakini jika praktik-praktik perkebunan kelapa sawit berkelanjutan ini diterapkan sesuai prosedur, bentang alam yang ada di Berau maupun di Provinsi Kalimantan

Timur secara keseluruhan akan terjaga. Kelestarian bentang alam ini berguna untuk generasi kini dan akan datang.

MENGELOLA BATAS-BATAS BENTANG ALAM BERNILAI KONSERVASI TINGGI

Berdasarkan kesepakatan tujuh kepala daerah dalam pertemuan Satuan Tugas Gubernur untuk Hutan dan Iklim atau *Governor's Climate and Forest-Task Force* (GCF-Task Force) di Balikpapan, Kalimantan Timur pada 2017, salah satu arah kebijakannya adalah melindungi area hutan yang masih tersisa serta lahan gambut pada kawasan peruntukan perkebunan dan lahan dengan izin usaha perkebunan. Kawasan inilah yang kemudian masuk ke dalam kriteria Area dengan Nilai Konservasi Tinggi (ANKT).

Untuk memudahkan pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten dan kota, di Kalimantan Timur dalam memantau dan mengelola ANKT di kawasan perkebunan, dilakukan penyusunan peta indikatifnya. Peta indikatif adalah sebuah gambaran spasial area bernilai konservasi tinggi. Peta ini diidentifikasi secara indikatif dan menyeluruh di seluruh bentang alam dan/atau wilayah kabupaten dan kota. Pengambilan datanya berada pada lahan yang telah, maupun yang belum dibebani izin, namun berada pada lahan peruntukan perkebunan sesuai dengan pola ruang perkebunan daerah. Peta ini diperlukan agar batas-

batas bentang alam bernilai tinggi tetap terjaga dan tidak ada pembukaan lahan di area tersebut. Peta indikatif yang dihasilkan telah melalui konsultasi pemangku kepentingan yang inklusif dan partisipatif.

Berdasarkan Pergub tentang Pengelolaan ANKT di Area Perkebunan, peta indikatif ANKT terdiri atas peta tingkat provinsi dan tingkat kabupaten/kota. Skala peta yang ditetapkan pada area perkebunan tingkat provinsi adalah 1:250.000. Sedangkan untuk area perkebunan tingkat kabupaten/kota ditetapkan dengan skala peta 1:50.000.

Peta indikatif ANKT yang telah ada perlu diperbarui, berdasarkan hasil pemantauan atas kondisi di lapangan. Untuk peta indikatif di tingkat provinsi, hasilnya perlu diperbarui setiap lima tahun sekali. Sementara itu, peta indikatif di tingkat kabupaten atau kotamadya diperbarui setiap dua tahun sekali.

Agar peta indikatif ini benar-benar tepat guna, proses penyusunannya dilakukan secara terbuka dan partisipatif. Bukan hanya pemerintah dan perusahaan, melainkan juga masyarakat.

Masyarakat yang berpotensi terkena dampak, baik langsung maupun tidak langsung, dilibatkan dalam pembuatan peta indikatif. Pun halnya perusahaan, baik yang terkena atau memberikan dampak langsung maupun

tidak langsung. Di samping itu, mitra kerja pembangunan pemerintah dan akademisi yang memiliki kompetensi di bidang keanekaragaman hayati, lingkungan dan sosial budaya, juga dilibatkan dalam proses pembuatannya.

Peta indikatif yang ada akan menjadi referensi dalam Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dan penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah dan Kabupaten/Kotamadya.

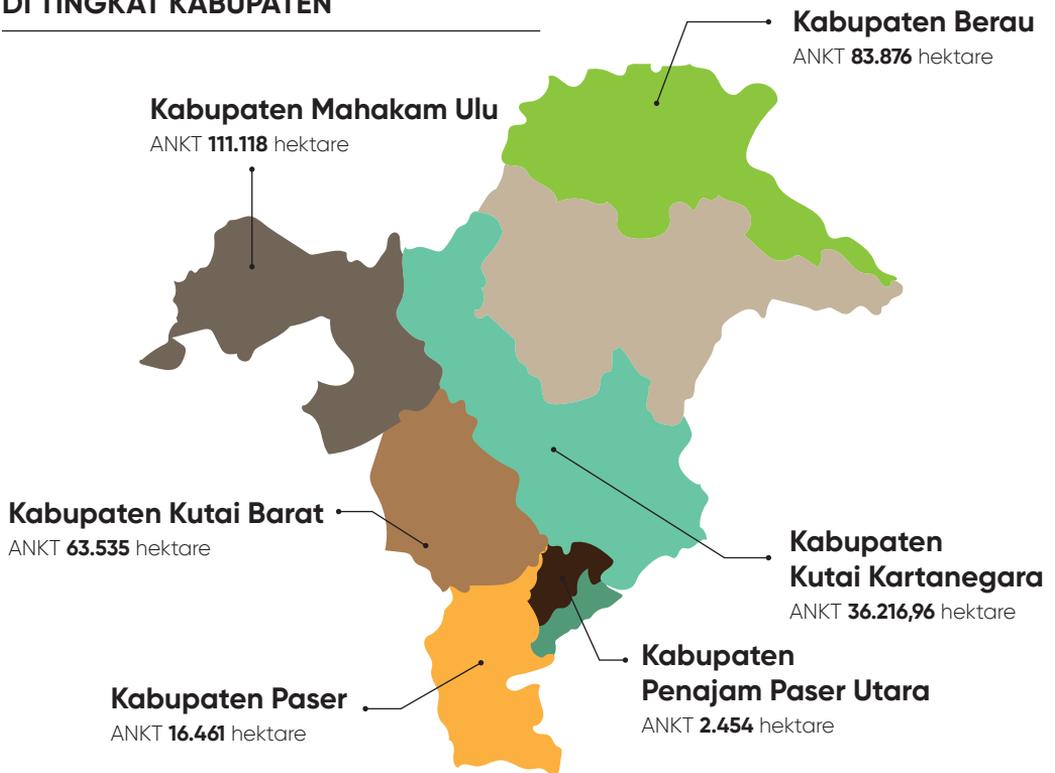
Sangat pentingnya peta indikatif ini terhadap kelangsungan bentang alam yang lestari, YKAN bersama mitra seperti Forum Komunikasi Perkebunan Berkelanjutan Provinsi Kaltim, terus mendorong komitmen

Forum KPB tak bisa lepas dari peran masyarakat yang tinggal di sekitar perkebunan kelapa sawit.

©YKAN2020



PETA INDIKATIF PENGELOLAAN ANKT DI TINGKAT KABUPATEN



pemerintah daerah baik di provinsi maupun kabupaten dan kotamadya di Kalimantan Timur. Hasilnya, ada enam kabupaten yang telah memiliki regulasi yang menetapkan luasan wilayah peta indikatif ANKT ini berupa SK Bupati, yaitu Kabupaten Berau, Kutai Kartanegara, Kutai Barat, Paser, Penajam Paser Utara (PPU) dan Mahakam Hulu.

Kabupaten Berau, sebagai kabupaten percontohan pembangunan perkebunan sawit berkelanjutan, memiliki luasan indikatif ANKT sebesar 83.876 hektare. Kabupaten Mahakam Hulu memiliki luasan indikatif ANKT terbesar yakni 111.118 hektare. Kemudian Kabupaten Kutai barat dengan luasan sebesar

63.535 hektare, Kabupaten Kutai Kartanegara seluas 36.216,96 hektare, Kabupaten Paser dengan luasan indikatif 16.461 hektare dan terakhir Kabupaten Penajam Paser Utara seluas 2.454 hektare.

Dengan terjaganya bentang alam yang bernilai tinggi berupa ANKT, pembangunan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan yang rendah emisi bisa berjalan dengan baik. Komitmen semua pihak diperlukan dalam pelaksanaannya. Karena sejatinya, bentang alam yang terjaga dengan baik adalah kunci pengelolaan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan.



Biawak air (*Varanus salvator*)

©YKAN2020

MASYARAKAT DALAM PERKEBUNAN BERKELANJUTAN

Inisiatif Masyarakat Melakukan Perubahan untuk Kelapa Sawit Berkelanjutan

Perubahan yang terjadi pada bentang alam, baik oleh karena faktor alami maupun antropogenik (oleh karena ulah manusia), akan mengubah manusia yang ada di dalamnya. Namun, tak bisa dipungkiri, kebutuhan hidup manusia yang terus meningkat kerap berujung pada pembangunan yang mengubah bentang alam.

Perubahan akan terus terjadi, tetapi kehidupan manusia dan kelestarian alam dapat berjalan beriringan. Hal ini menjadi landasan YKAN dalam mengembangkan strategi pengelolaan sumber daya hutan yang ramah lingkungan, salah satunya dengan pendekatan Aksi Inspirasi Warga Untuk Perubahan (SIGAP) yang memberdayakan masyarakat di tingkat tapak.

Pendekatan SIGAP YKAN didasarkan pada pengalaman yang disusun dari sebuah sistematika dengan pola 7D. Pendekatan 7D ini terdiri dari Dekatkan diri, hati dan pikiran (*Disclosure*),

yang dilanjutkan dengan Dialogkan tema perubahan (*Define*). Berikutnya adalah Dapatkan kekuatan (*Discovery*), yang dilanjutkan dengan Deklarasikan impian (*Dream*). Setelah itu Detilkan rencana perubahan (*Design*), kemudian Daya upayakan perubahan (*Delivery*) dan terakhir Dunggunkan keberhasilan (*Drive*). SIGAP amat berperan dalam pengembangan masyarakat di Berau, karena SIGAP merupakan pendekatan untuk pelibatan masyarakat dalam upaya perlindungan dan penyelamatan hutan, dengan menekankan pendekatan berbasis potensi yang dimiliki desa.

SIGAP di sektor perkebunan kelapa sawit mulai diinisiasi oleh YKAN pada 2017, sebagai pendampingan masyarakat dalam upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. SIGAP membantu warga desa, fasilitator, dan

pemerintah untuk merekam, mencatat, serta mengabadikan beragam hal positif tentang pelaksanaan pembangunan di wilayahnya.

SIGAP sangat cocok diimplementasikan pada sektor pembangunan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan. Karena pembangunan yang efektif membutuhkan kolaborasi multipihak, di mana partisipasi masyarakat menjadi penting. Dengan SIGAP, masyarakat dan desa dapat saling berbagi dan menginspirasi satu sama lain.

Kabupaten Berau menjadi lokasi program percontohan implementasi pendekatan SIGAP di sektor perkebunan kelapa sawit. Dalam kurun 5 tahun (2017-2022), YKAN menerapkan pendekatan SIGAP di lima kampung yang posisinya dikelilingi oleh perusahaan sawit.

Bibit yang baik salah satu kunci keberhasilan perkebunan yang berkelanjutan.

©YKAN2020



Kampung Long Ayan dan Gunung Sari di Kecamatan Segah menjadi lokasi program pada tahap pertama, yaitu pada 2017-2019. Sementara tiga kampung lainnya, yakni Kampung Karang, Biatan Lempake dan Biatan Bapinang mereplikasi kesuksesan program SIGAP di dua kampung sebelumnya, pada kurun 2020-2022.

Untuk mendukung SIGAP di sektor perkebunan kelapa sawit di Berau, pemerintah kabupaten Berau mengeluarkan payung hukum berupa Peraturan Bupati No. 56 tentang Pejuang Sigap Sejahtera. Peraturan ini merupakan hasil tindak lanjut dari Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur No. 26 Tahun 2018 tentang SIGAP dalam Pembangunan Desa.

Ada tiga hal utama yang menjadi sasaran agar masyarakat dan kampung lebih sejahtera melalui SIGAP. Yakni peningkatan tata kelola pemerintahan kampung, pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan, dan pengembangan strategi penghidupan berkelanjutan.

Pada program pendekatan SIGAP di sektor perkebunan kelapa sawit di lima kampung, capaian keberhasilan untuk tata kelola pemerintahan yang baik adalah telah tersedianya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung (RPJMK). Selain itu, mereka

juga telah memiliki profil kampung dan sistem keuangan kampung yang lebih baik. Kemudian dari tata kelola sumber daya alam, kelima kampung tersebut kini telah memiliki peta Rencana Tata Guna Lahan (RTGL). Di dalamnya termasuk pengusulan perhutanan sosial serta tata kelolanya. Kemudian telah tersedia pula pendataan kebun sawit swadaya serta pemetaan kawasan ANKT.

Adapun untuk pengembangan ekonomi kampung, dengan diimplementasikannya pendekatan SIGAP di sektor perkebunan kelapa sawit, kini kampung bisa memetakan potensi dan aset kampung, memperbaiki tata kelola Badan Usaha Milik Kampung (BUMKam) serta mendorong kelengkapan administrasi BUMKam.

Program SIGAP di perkebunan kelapa sawit telah memberikan langkah awal untuk masyarakat di kampung Gunung Sari, Long Ayan, Biatan Lempake, Karang dan Biatan Bapinang, dalam membangun tata kelola sumber daya alam, hutan dan lahan yang merupakan aset kampung. Kelima kampung dampingan tersebut kini telah menetapkan sejumlah kawasan khusus konservasi yang menjadi sumber plasma nutfah warga.

Kendati demikian, komitmen-komitmen yang ada terkait pengelolaan sumber daya alam secara lestari berpotensi hilang. Musababnya adalah tekanan

dari pemangku kepentingan sawit untuk dapat terus mengembangkan lahan lain yang tersisa menjadi area perkebunan sawit.

Karenanya pendekatan SIGAP di sektor perkebunan kelapa sawit tidak cukup hanya diimplementasikan di lima kampung. Memang, terbatasnya waktu, biaya dan tenaga menjadi tantangan untuk replikasi maupun perluasan program ini ke kampung-kampung lain yang berada di sekitar perkebunan sawit di Kabupaten Berau. Maka, pengembangan di lima kampung yang sudah ada harus diikuti dengan skema jaminan keberlanjutan mulai dari level kampung, hingga ke level pemerintah pusat.

Salah satu upaya agar tak berhenti capaian yang baik ini adalah advokasi lebih lanjut, sehingga pembelajaran dari implementasi SIGAP di sektor perkebunan kelapa sawit bisa menjadi panduan nasional dalam pengembangan konservasi sumber daya alam berbasis kampung. Pembelajaran

ini juga perlu dijadikan substansi peraturan perundang-undangan yang mengikat komitmen semua pihak, termasuk perusahaan sawit dan pemerintah, baik di level pusat hingga ke level kampung/desa.

MEMETAKAN LAHAN, MEMETAKAN MANUSIA DAN PERUBAHAN

Sejatinya, memetakan lahan berarti juga memetakan manusia yang ada di dalamnya agar siap menghadapi perubahan karena pembangunan. Pembangunan dalam upaya memenuhi kebutuhan manusia, kerap tumpang tindih di banyak lokasi. Lahan yang ada, acap menjadi sengketa atau memiliki konflik tenurial yang panjang

Oleh karena itu, penyusunan tata guna lahan amat diperlukan untuk mengatur pembagian wilayah dengan baik, mulai dari tingkat kampung hingga provinsi. Di Kalimantan Timur, sekarang sudah dimulai penyusunan Rencana Tata Guna Lahan (RTGL) di tingkat unit kecil dari pemerintahan, yaitu desa atau kampung.

Dampak positif keberadaan peta RTGL adalah batas-batas wilayah kampung kini menjadi lebih jelas.

Pemerintahan Kabupaten Berau menyadari bahwa untuk meminimalkan konflik yang terjadi antara perusahaan perkebunan, khususnya kelapa sawit dengan masyarakat adalah dengan mendorong kampung memiliki peta RTGL. Proses penyusunan peta di sejumlah kampung di Kabupaten Berau mendapat pendampingan dari YKAN dan GIZ. Hasilnya, beberapa kampung sudah ada peta RTGL, bahkan sudah ada pula yang dikukuhkan dengan Peraturan Kampung.

Beberapa kampung di Berau yang telah memiliki peta RTGL, antara lain Kampung Long Ayan, Gunung Sari, Biatan Lempake, Biatan Bapinang, Karangan, Long Ayap, Long Laai dan Dumaring. Kemudian menyusul Kampung Merapun, Panaan, Muara Lesan, Lesan Dayak dan Sidobangen.

Penyusunan peta RTGL membuat perangkat kampung dan warga lebih mengenal lagi aset-aset kampung yang mereka miliki. Proses penyusunannya juga mengungkap puluhan potensi lain di kampung, seperti potensi wisata, potensi budaya dan potensi ekonomi yang akan menjadi aset andalan membangun kampung.

Dampak positif keberadaan peta RTGL adalah batas-batas wilayah kampung kini menjadi lebih jelas. Dengan demikian persaudaraan antar kampung menjadi lebih erat dan mereka bisa

berkolaborasi dalam membangun perekonomian kampung.

Keberadaan peta RTGL sangat penting karena mengembalikan amanat UU No. 6 Tahun 2014 tentang Kampung. Undang-undang ini menyebutkan bahwa penetapan kebijakan di tingkat kampung akan didahulukan, sehingga warga memiliki kewenangan untuk merancang dan mengimplementasikan ruang hidupnya.

Partisipasi warga dalam penyusunan peta RTGL ini, selain mempercepat proses, juga memberikan kesempatan untuk mengetahui makna mendalam terhadap identitas diri dan sosial mereka, dalam melakukan perubahan dari kampung. Model peta RTGL ini menjadi modal awal kampung dalam pembangunan kampung yang selaras dengan kearifan lokal, potensi, aset serta kekayaan alamnya.

NEGOSIASI DAN MEDIASI KUNCI KELAPA SAWIT BERKELANJUTAN BAGI MASYARAKAT

Jajaran pohon-pohon kelapa sawit yang berdiri rapi terkadang tak serapi saat kita memandangnya lebih dalam. Konflik tenurial kerap terjadi di perkebunan tempat kelapa sawit-kelapa sawit ditanam, khususnya milik perusahaan besar. Lokasi perkebunan kelapa sawit besar yang berada di tepian atau batas kampung dan lahan masyarakat, kerap menimbulkan konflik.

Rencana tata guna lahan yang baik menjadi salah satu kunci untuk mengurai konflik tenurial di perkebunan kelapa sawit. Salah satu upaya untuk mengurangi jumlah konflik ini adalah dengan analisis peta. Dinas Perkebunan Kabupaten Berau menganalisis dengan menumpang susunan peta rencana penggunaan lahan di sejumlah kampung dengan peta izin perkebunan di Kabupaten Berau. Hasilnya bisa dilihat batas-batas wilayah kampung dengan wilayah perkebunan.

Ketika batas tersebut menjadi lebih jelas, analisis peta digunakan sebagai bahan untuk mendukung kerja sama atau kesepakatan penggunaan lahan antara masyarakat dan perusahaan perkebunan di Kabupaten Berau. Lima kampung,

yakni Gunung Sari, Long Ayan, Long Ayap, Long Laai dan Dumaring telah difasilitasi GIZ dalam perjanjian penggunaan lahan dengan perusahaan kelapa sawit.

GIZ mendampingi proses negosiasi dan mediasi antara masyarakat dan perusahaan. Secara umum ada tiga instrumen yang dikembangkan dalam siklus pengelolaan konflik, yaitu pencegahan, penanganan dan pemulihan pasca konflik. Dari tiga instrumen tersebut, digunakan pendekatan dengan cara mengidentifikasi perbedaan antara masyarakat dan perusahaan dalam rencana penggunaan lahan yang disebut *areas of interest* (Aoi) atau wilayah penting. Perbedaan tersebut merupakan potensi konflik yang dinegosiasikan oleh kedua belah pihak.

Hamparan tanaman kelapa sawit di lokasi perkebunan kelapa sawit Kabupaten Berau, Kalimantan Timur.

©YKAN2020



Kemudian, dilakukan proses negosiasi-konsultasi yang membahas rencana penggunaan lahan kampung oleh masyarakat dengan rencana pengembangan perkebunan perusahaan. Akan dicari titik temu jika ternyata terjadi konflik antara rencana masyarakat dan perusahaan di dalam lahan.

Peta wilayah penting yang telah disepakati masyarakat dan peta pengembangan perkebunan perusahaan menjadi dasar negosiasi dan konsultasi tersebut. Kehadiran mediator membantu masyarakat dalam hal teknis dan menyiapkan masukan tentang bagaimana menemukan solusi permasalahan dengan perusahaan. Tujuan akhir mediasi ini adalah

mendorong lahirnya kemitraan yang saling menguntungkan.

Bila telah terjadi kesepakatan dalam rencana penggunaan lahan milik masyarakat dan rencana pengembangan perkebunan perusahaan, maka akan ada penandatanganan perjanjian. Perjanjian ini tak hanya antara masyarakat dan perusahaan, namun juga hasil persetujuan kampung tetangga yang terkena dampak serta Pemerintah Kabupaten Berau.

Pembangunan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan, sejatinya adalah untuk masyarakat. Sebab itu, jangan sampai pembangunan yang ada justru merugikan mereka yang hidup dan tinggal di sekitar perkebunan kelapa sawit.

Solusi untuk mencapai keuntungan bersama memerlukan data pendukung dan harus melalui proses yang panjang. Peta tata guna lahan yang dibuat partisipatif, mewakili para pemangku kepentingan di kampung, baik dari pemerintah, perusahaan, maupun masyarakat. Fasilitator lokal berperan penting dalam mendampingi dalam proses negosiasi dan menemukan titik temu antara perusahaan dan masyarakat. Kemudian, hadirnya pemerintah daerah sebagai regulator juga tak kalah penting, sehingga semua kesepakatan yang ada berkekuatan hukum yang sah.





Aplikasi perkebunan kelapa sawit berkelanjutan harus dilakukan dari hulu ke hilir termasuk pengelolaan limbah cair.

©YKAN2020

Capaian yang bisa dilihat adalah masyarakat di lima kampung telah menggunakan RTGL yang terintegrasi ke dalam rencana pembangunan kampung untuk kesepakatan penggunaan lahan dengan perusahaan. Proses negosiasi di empat kampung masih berjalan, sedangkan satu kampung telah menemukan kesepakatan. Mediasi konflik lahan antara satu kampung dan satu perusahaan telah berhasil mencapai kesepakatan mengeluarkan 441 ha dari HGU perusahaan.

Hasil yang baik ini diharapkan mampu diduplikasikan ke daerah lain hingga keluar Kalimantan Timur guna mewujudkan praktik perkebunan kelapa sawit berkelanjutan. Untuk itulah sebuah panduan teknis dan *booklet* pengelolaan konflik dan fasilitasi kemitraan disusun guna memberikan panduan praktis pada pihak-pihak yang terlibat dalam proses mediasi dan negosiasi penggunaan lahan dan fasilitasi kemitraan. Panduan teknis untuk skala nasional ini difokuskan untuk lima kelompok pengguna, yaitu pekebun, perusahaan, pendamping pekebun, pemerintah, dan mediator profesional.

MENJAGA KUALITAS, MENYEJAHTERAKAN MANUSIA

Mendata Lahan Perkebunan Kelapa Sawit Mandiri,
Menjamin Kualitas Hasil

Pasokan kelapa sawit Indonesia bersumber dari perkebunan besar, baik swasta maupun negara, dan perkebunan rakyat. Perkebunan rakyat berupa perkebunan plasma yang merupakan kerja sama antara petani dengan perusahaan dan perkebunan kelapa sawit rakyat/mandiri.

Petani kelapa sawit rakyat atau petani kelapa sawit mandiri adalah petani yang mengusahakan lahan kelapa sawit di bawah 25 hektare, baik petani plasma atau independen. Menurut data Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, Kementerian Pertanian, luas perkebunan kelapa sawit mandiri pada 2017 telah mencapai 52 persen dari luas kebun kelapa sawit di Indonesia. Namun, data ini hanyalah perkiraan numerik yang belum dilengkapi dengan data spasial yang dapat menunjukkan lokasi dan pemilik kelapa sawit rakyat tersebut.

Salah satu program yang dilakukan YKAN bersama mitranya, GIZ dan CPI, adalah membantu pemerintah, khususnya Dinas Perkebunan, dalam pendataan untuk pendaftaran Surat Tanda Daftar Budidaya (STD-B) kelapa sawit di Kabupaten Berau. Upaya pendataan ini untuk membantu mengetahui permasalahan perkebunan kelapa sawit di lapangan. Misalnya, luasan lahan yang tidak sesuai dengan produktivitas kebun.

Apabila data pendukung yang menjelaskan produktivitas kebun kelapa sawit mandiri itu tidak ada, dapat menyebabkan berbagai instrumen kebijakan terkait pengembangan perkebunan kelapa sawit rakyat yang digelontorkan pemerintah menjadi tidak tepat sasaran. Padahal, pemerintah memiliki sejumlah program untuk petani kelapa sawit mandiri, seperti program revitalisasi perkebunan, program peremajaan tanaman, program bantuan bibit, dan program bantuan pupuk. Kesemuanya akan berjalan tidak optimal.

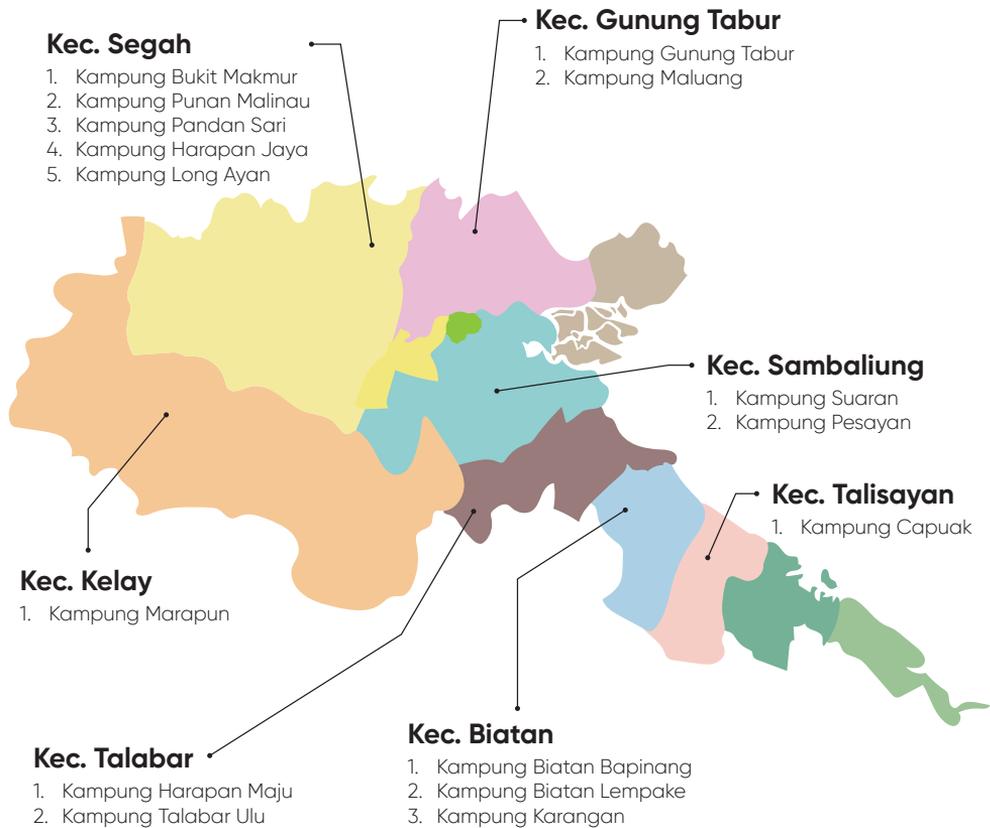
Inilah masalah yang terus membelenggu pengembangan perkebunan kelapa sawit rakyat. Salah satu contoh adalah pelaksanaan program peremajaan kelapa sawit rakyat (PSR) oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS). Program yang diluncurkan pada tahun 2017 di seluruh Indonesia ini tak berjalan optimal karena minimnya data dan informasi

tentang kebun kelapa sawit rakyat. Padahal, program peremajaan kelapa sawit rakyat dengan dana BPDPKS ini adalah upaya untuk meningkatkan produktivitas kelapa sawit rakyat yang diperkirakan hanya mencapai kurang dari 3 ton/hektare/tahun.

Guna membantu pendataan kebun kelapa sawit mandiri ini, YKAN melalui GIZ mengembangkan sebuah aplikasi bernama SIPRAMA. SIPRAMA adalah Website Geospasial Sistem Informasi Perkebunan Rakyat Mandiri, yang merupakan bagian dari sistem aplikasi pendataan dan registrasi kebun rakyat mandiri. Aplikasi ini membantu pendataan kebun-kebun kelapa sawit yang dimiliki oleh pekebun mandiri.

Pendataan petani kelapa sawit mandiri ini bertujuan untuk memperoleh data lapangan yang akurat tentang status, tingkat produktivitas, pemilik dan data teknis kebun. Dengan data tersebut, pemilik kebun nantinya bisa memiliki STD-B. STD-B adalah salah satu syarat untuk sertifikasi Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO) atau perkebunan sawit berkelanjutan bagi perkebunan kelapa sawit rakyat. Surat ini adalah bahan penting untuk menyusun kebijakan tata kelola perkebunan.

Kini, sebanyak 16 kampung di Berau telah terdata dengan baik, perihal perkebunan kelapa sawit rakyat mandiri. Dengan kelengkapan data ini,



Peta sebaran 16 kampung SIPRAMA

maka pembinaan terhadap petani kecil akan semakin baik, sehingga mampu meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi kelapa sawit berkelanjutan.

PASOKAN BERKELANJUTAN DAN PENINGKATAN KESEJAHTERAAN

Setelah selama dua dekade mengandalkan sumber pendapatan daerah dari industri pertambangan, Pemerintah Kabupaten Berau menyadari bahwa kekuatan ekonomi masa depan mereka ada pada sektor budidaya, bukan lagi sektor ekstraksi sumber daya alam. Kelapa sawit adalah komoditas menjanjikan dan terus tumbuh dengan

pesat. Hanya dalam enam tahun, total area perkebunan bertambah dari 40 ribu hektare menjadi 120 ribu (CPI, 2018).

Pemerintah Kabupaten Berau sendiri telah berkomitmen melakukan pembangunan hijau yang diteguhkan dalam Program Karbon Hutan Berau (PKHB). Program ini adalah upaya Berau mengurangi emisi karbon dari deforestasi dan degradasi hutan. Sejak dideklarasikan pada 2008, PKHB menjadi panduan pemerintah daerah untuk membuat kebijakan pembangunan yang selaras dengan pengelolaan sumber daya alam yang lestari.

Dalam Rencana Strategis PKHB disebutkan bahwa sekitar 70 persen penyebab kenaikan deforestasi Berau adalah konversi hutan alam menjadi area perkebunan kelapa sawit dan 22 persennya akibat konversi hutan menjadi hutan tanaman industri. Sebagai catatan, luas perkebunan sawit di Berau sekitar 257 ribu hektare (2021) atau mewakili 18,72 persen luas perkebunan sawit di Kalimantan Timur (Dinas Perkebunan Kalimantan Timur, 2021). Padahal, data tahun 2014 menunjukkan, sekitar 75 persen kawasan Berau masih hutan alami. Upaya Pemerintah Kabupaten Berau dalam menyelaraskan perkembangan perkebunan kelapa sawit dengan pengelolaan sumber daya alam

yang lestari ditempuh dengan program perkebunan berkelanjutan.

Spesifik pada pembangunan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan, Dinas Perkebunan Kabupaten Berau kini tidak akan mengeluarkan perizinan baru. Dinas Perkebunan Kabupaten Berau pun telah merencanakan beberapa strategi.

Strategi pertama adalah meningkatkan produktivitas kebun kelapa sawit. Kemudian memperoleh data yang lebih baik mengenai para pelaku di sepanjang rantai pasokan. Berikutnya memperkuat organisasi petani kecil mandiri, serta memperkuat kemitraan dan integrasi antara petani mandiri dan perusahaan.

Perawatan bibit kelapa sawit untuk mendapatkan hasil yang maksimal.

©YKAN2020



Untuk itu YKAN bekerja sama dengan *Climate Policy Initiative* (CPI) melakukan studi tentang skenario produksi berkelanjutan. Studi ini adalah upaya untuk meningkatkan pendapatan perusahaan dan petani kecil mandiri.

Hasil temuan dari studi rantai pasok kelapa sawit berkelanjutan di Berau, CPI melihat bahwa ada peluang signifikan untuk mengoptimalkan penggunaan lahan dan memperbaiki rantai pasok. Peluang tersebut muncul karena dalam penelitian ditemukan fakta bahwa lahan konsesi perkebunan yang bernilai konservasi rendah masih banyak yang belum ditanami. Kemudian umur pohon kelapa sawit yang relatif muda, sekitar empat hingga sembilan tahun, sedangkan produktivitas puncak dimulai dari tujuh tahun. Berdasarkan fakta di atas—seiring waktu tanaman yang masuk ke produktivitas puncak (tahun ketujuh)—Berau akan memenuhi 90 persen potensi produksi tanpa perlu menambah lahan.

Strategi kedua adalah mendukung kemitraan yang lebih kuat antara petani kecil dan pabrik perusahaan. Tentunya dengan didahului peningkatan kualitas produksi petani kecil mandiri. Adanya kemitraan ini membuka jalan menuju efisiensi. Petani kecil akan lebih mudah mengangkut hasil kebunnya ke perusahaan dan tidak perlu jauh-jauh menjual tandan buah segarnya (TBS). Dalam arti lain, petani

mampu menemukan pembeli tanpa mengeluarkan biaya transaksi besar, misalnya biaya transportasi. Hal ini penting karena nilai TBS akan menurun kualitasnya secara signifikan dalam dua hari setelah panen. Inilah pentingnya kemitraan yang membuat rantai pasok menjadi lebih efisien.

Kelembagaan petani menjadi penting dalam proses kemitraan dengan perusahaan. Koperasi Kampung adalah pilihan yang memungkinkan dalam upaya ini. Keberadaannya akan membantu pembiayaan petani dalam pelatihan teknis, pembelian pupuk, dan pengadaan bibit yang membantu peningkatan produktivitas kebun. Kerja sama antara koperasi dengan perusahaan semakin membuka akses petani kepada industri pengolahan kelapa sawit. Namun, untuk mencapai simbiosis mutualisme antara koperasi dan industri, perlu posisi tawar yang sejajar. Artinya penguatan kapasitas bagi koperasi juga harus ditingkatkan, baik dalam hal manajerial maupun pengelolaan pascapanen dari hasil tandan buah segar kelapa sawit yang berkualitas.

Selain koperasi, potensi kelembagaan yang dapat dieksplorasi adalah Badan Usaha Milik Kampung (BUMKam). Lembaga seperti BUMKam, berpeluang mendapatkan pinjaman ke insitusi keuangan lebih tinggi karena diajukan secara kolektif. Aksesibilitas terhadap



Standar alat panen yang digunakan akan menghasilkan kualitas tandan buah segar yang lebih optimal.

©YKAN2020

berbagai institusi keuangan membuka berbagai peluang pembiayaan bagi petani mandiri.

Dari sisi kapasitas petani, pengetahuan dan kemampuan dalam membuat rencana bisnis yang matang dan memproyeksikan produktivitas, perlu terus dimutakhirkan. Perencanaan ini mencakup proyeksi produksi serta permintaan dari pembeli serta biaya transportasi dari lahan perkebunan kelapa sawit kepada pembeli.

Tak hanya kelapa sawit, berdasarkan studi CPI 2018 sumber pendapatan lain juga dapat berkontribusi pada rencana

bisnis yang lebih baik. Petani diajak tidak hanya mengandalkan kelapa sawit, tetapi juga bekerja menghasilkan pendapatan lain seperti jagung, kakao, lada dan atau peternakan. Sumber pendapatan alternatif ini juga diperhitungkan dalam meningkatkan peluang mereka untuk mendapatkan akses ke keuangan.

Peningkatan produktivitas perkebunan kelapa sawit mandiri dengan kualitas yang baik, akan menjamin pasokan tandan buah segar. Ketika pasokan ini terjamin, maka petani kecil juga akan mendapatkan keuntungan serta peningkatan kesejahteraan.

KERJA BERSAMA UNTUK KEBERLANJUTAN

Bekerja Bersama untuk Kesejahteraan dan
Sawit Berkelanjutan

Pembangunan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan yang dilakukan di Kabupaten Berau dan di Kalimantan Timur tak bisa berjalan baik jika tak ada sinergi dari para pemangku kepentingannya.

Salah satu masalah pelik dalam pembangunan kelapa sawit berkelanjutan adalah konflik tenurial. Isu ini adalah isu lintas sektoral. YKAN bersama DDPI (Dewan Daerah Perubahan Iklim) Kalimantan Timur melihat pentingnya merangkul berbagai pemangku kepentingan terkait program perkebunan berkelanjutan dalam sebuah forum. Forum dapat menjadi wadah komunikasi untuk membangun komunikasi antarpihak dalam membuat rekomendasi penyelesaian permasalahan dan tantangan dalam implementasi pembangunan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan.

Kehadiran forum diperkuat dengan lahirnya Peraturan Gubernur No. 52 tahun 2018 tentang pembentukan Forum Komunikasi Perkebunan Berkelanjutan (Forum KPB). Forum multipihak ini beranggotakan perwakilan dari pemerintah maupun swasta, perorangan, asosiasi dan akademisi yang saling keterkaitan terhadap perkebunan berkelanjutan.

Selain sebagai wadah komunikasi, forum ini bertugas untuk merumuskan, merencanakan, memfasilitasi, dan mencari solusi dalam masalah perkebunan di Kalimantan Timur. Tentunya tanpa melepaskan azas kemandirian, independen dan kesepahaman, dengan tetap dibatasi oleh tugas pokok dan fungsi yang diberikan.

Namun secara lugas, sebenarnya Forum KPB yang dibina oleh Gubernur dan diketuai oleh Sekretaris Daerah ini juga bertujuan untuk memberikan rekomendasi yang mendukung, mengembangkan strategi-strategi percepatan pembangunan perkebunan berkelanjutan, dan penyelesaian permasalahan perkebunan multisektor di daerah.

Tak hanya di tingkat provinsi, pembentukan forum serupa di Kabupaten Berau diinisiasi oleh YKAN dengan dukungan DDPI Kaltim dan GIZ. Forum KPB di Berau memiliki payung



Pengelolaan kawasan konservasi yang baik adalah kunci keberhasilan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan.

©YKAN2020

hukum berupa Peraturan Bupati Berau No.52 tahun2019 tentang pembentukan Forum Komunikasi Perkebunan Berkelanjutan. Kehadiran forum ini membuka cakrawala isu perkebunan kelapa sawit rendah emisi. Sebelumnya, Pemerintah Kabupaten Berau belum memiliki rekomendasi kebijakan khusus terkait perkebunan kelapa sawit rendah emisi. Namun, sejak adanya Forum KPB di Kabupaten Berau, isu perkebunan kelapa sawit berkelanjutan dan rendah emisi selalu menjadi poin penting dalam setiap diskusi yang dilaksanakan di Kabupaten Berau.

Sesuai tugasnya, diharapkan forum ini makin memudahkan proses pembangunan kelapa sawit berkelanjutan di Kalimantan Timur, khususnya di Kabupaten Berau.

EPILOG

KELAPA SAWIT BERKELANJUTAN DAN MASA DEPAN

Pekerjaan untuk mewujudkan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan dan rendah emisi terus bergulir dengan segala tantangannya. Provinsi Kalimantan Timur dan Kabupaten Berau sebagai percontohan pun terus berbenah dan menyempurnakan kembali pekerjaan yang telah dilakukan.

Berawal dari ketersediaan data yang baik, satu atap dan tidak tumpang tindih, perizinan yang tepat sasaran akan bisa dilakukan untuk pembukaan perkebunan, termasuk kelapa sawit. Dengan semakin mumpuninya sumber daya manusia, baik di pemerintahan, swasta, hingga masyarakat, maka upaya terciptanya perkebunan kelapa sawit berkelanjutan berjalan sesuai harapan.

Tak hanya itu, kompensasi dan remediasi bagi keterlanjuran hilangnya Area Nilai Konservasi Tinggi (ANKT), kini menjadi solusi untuk mengembalikan keseimbangan alam. Perusahaan



Ekosistem yang terjaga akan memberikan dampak yang baik bagi perkebunan kelapa sawit.

©YKAN2020

dan perkebunan rakyat mandiri bertambah tingkat kesadartahuannya, bahwa dengan menjaga bentang alam, berarti juga menjamin produksi kelapa sawit menjadi lebih baik. Pemerintah pun mengawasi dan mengelola ANKT dengan lebih profesional.

Melihat kembali bahwa manusia adalah tujuan dari terjaganya bentang alam yang baik, akan menguatkan rasa tanggung jawab. Bahwa semua pekerjaan yang dilakukan adalah demi peradaban yang lebih baik untuk semua kalangan. Ketika semua skema inisiatif perkebunan berkelanjutan ini dijalankan dengan penuh amanah, maka yang mendapatkan keuntungan adalah manusianya juga.

Masih banyak kendala di lapangan dalam pelaksanaan program perkebunan kelapa sawit berkelanjutan ini. Di antaranya belum optimalnya

penggunaan beberapa alat kerja dan kapasitas sumber daya manusia yang perlu ditingkatkan. Penyadartahuan serta kepedulian menerapkan praktik ini juga harus dibangun, bahwa semua skema ini adalah demi kebaikan bersama.

Dari Berau, sebuah kabupaten di Kalimantan Timur, pembangunan kebun kelapa sawit berkelanjutan dan rendah emisi ini bermula. Harapannya, jerih baik ini bisa diduplikasikan tak hanya di Kalimantan Timur, namun ke seluruh Indonesia.

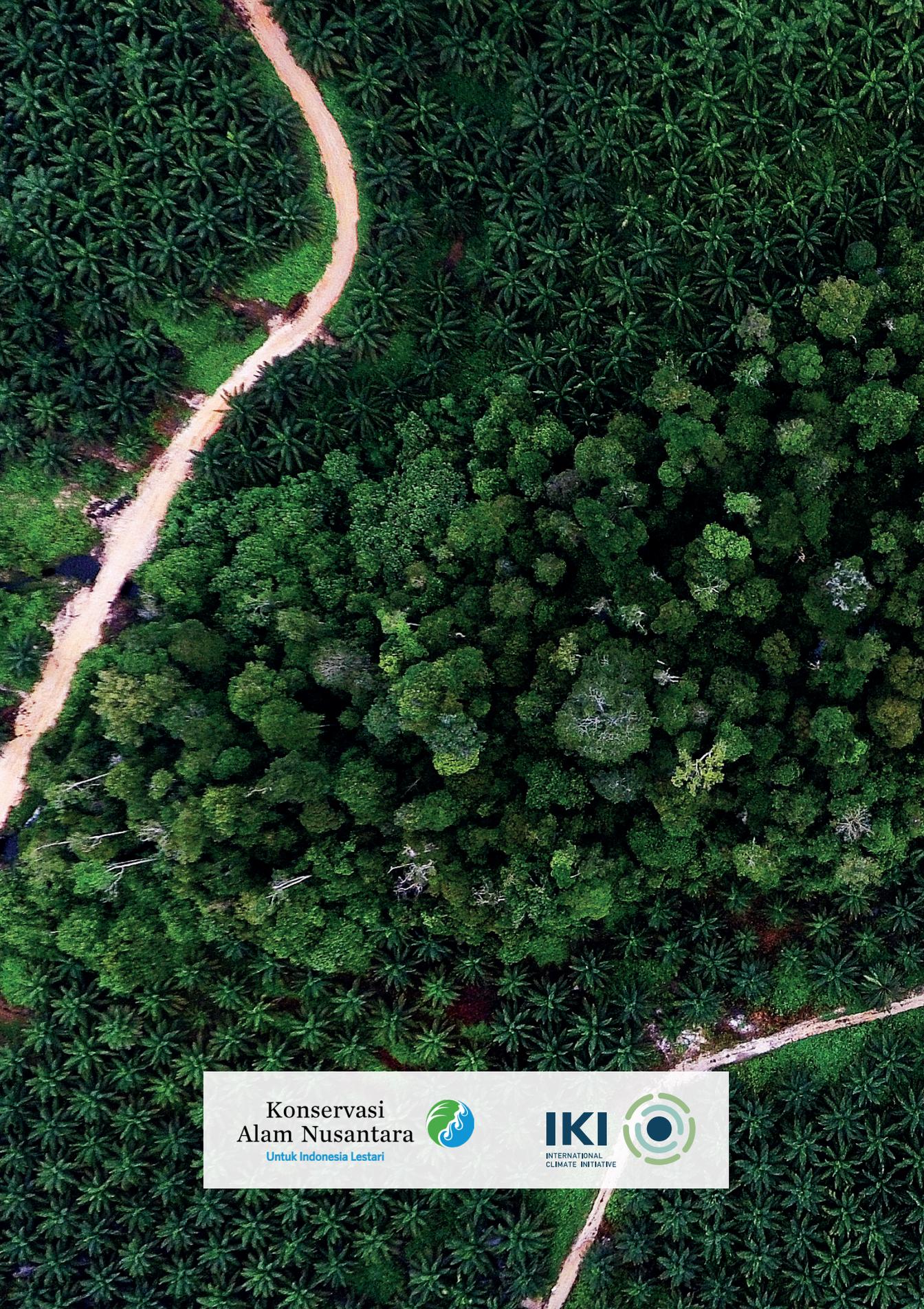
Jika tak kita mulai, jalan panjang menuju titik temu pembangunan yang berkelanjutan tak akan pernah tercapai. Harapannya, cerita di kebun kelapa sawit akan menjadi pengisi cerita-cerita di kemudian hari, tentang bagaimana kelapa sawit berguna bagi manusia dan selaras dengan kelestarian alam.

DAFTAR PUSTAKA

- Final Report Survey Pemetaan Petani Sawit Mandiri [Smallholders] Kabupaten Berau. 2016. Perkumpulan Menapak Indonesia. Berau.
- H Hartanto. dkk. 2014. SIGAP REDD+: Aksi Inspiratif Warga untuk Perubahan. The Nature Conservancy. Jakarta.
- Humanika. 2021. Dokumentasi Area Dengan Nilai Konservasi Tinggi (ANKT) Dan Penerapan Praktik Perkebunan Yang Baik. Dinas Perkebunan Kabupaten Berau dan Yayasan Konservasi Alam Nusantara (YKAN). Berau
- Iwied Wahyulianto dan Deni Wahyudi. 2020, Share Learning Penggunaan Aplikasi Pemetaan dan Pendataan Kebun Rakyat Mandiri di Kabupaten Berau dan Kutai Timur. Deutsche Gesellschaft fürInternationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH. Berau.
- Iwied Wahyulianto. 2022. Modul Penggunaan Aplikasi SIPRAMA. Deutsche Gesellschaft fürInternationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH. Berau.

- Keputusan Bupati Berau No 213 Tahun 2021 tanggal 11 Mei 2021 tentang Pengelolaan dan Penggunaan Aplikasi Pratinjau Usulan Perizinan Berbasis Lahan. Tanjung Redeb.
- Keputusan Bupati Berau No 287 Tahun 2020 tanggal 20 April 2020 tentang Penetapan Peta Indikatif Perlindungan Areal Dengan Nilai Konservasi Tinggi Dan Cadangan Karbon Tinggi Pada Kawasan Peruntukan Perkebunan Seluas ± 83.000 Hektar. Tanjung Redeb.
- Keputusan Bupati Berau No 595 Tahun 2019 tanggal 18 Oktober 2019 tentang Pengangkatan Pengurus dan Anggota Forum Komunikasi Perkebunan Berkelanjutan di Kabupaten Berau Masa Jabatan 2019-2022. Tanjung Redeb.
- Keputusan Gubernur Kalimantan Timur No 525 Tahun 2019 tanggal 15 April 2019 tentang Pengangkatan Pengurus dan Anggota Forum Komunikasi Perkebunan Berkelanjutan Provinsi Kalimantan Timur Masa Jabatan 2019-2022. Samarinda.
- Keputusan Kepala Dinas Perkebunan Kalimantan Timur No 188.4 Tahun 2017 tanggal 13 Februari 2017 tentang Pembentukan Tim Pengembangan Database dan Sistem Informasi Geospasial Perkebunan Berbasis Web Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur. Samarinda.
- Laporan Akhir Program Kampung SIGAP Sawit (KSS). Fasilitasi Kegiatan Perencanaan dan Pembangunan Melalui Pendekatan SIGAP di Sektor Perkebunan Sawit di Kabupaten Berau. 2022. YP2SU. Yayasan Konservasi Alam Nusantara (YKAN).
- M. Windrawan Inantha. dkk. 2020. STUDY REPORT : Land cover changes of Tsani Hutani Abadi Group's Concessions in West Kutai District -East Kalimantan. Yayasan Konservasi Alam Nusantara (YKAN). Jakarta
- Panduan Teknis Aplikasi Pratinjau Usulan Perizinan Berbasis Lahan di Kabupaten Berau. 2021. Tim Gugus Tugas Informasi Geospasial Kabupaten Berau. Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH. Yayasan Konservasi Alam Nusantara (YKAN). Berau.
- Peraturan Bupati Berau Nomor 52 Tahun 2019 tanggal 30 Juli 2019 tentang Pembentukan Forum Komunikasi Perkebunan Berkelanjutan. Tanjung Redeb.

- Peraturan Bupati Berau Nomor 56 Tahun 2018 tanggal 22 November 2018 tentang Pejuang Aksi Inspiratif Warga Untuk Perubahan Menuju Masyarakat Sejahtera. Tanjung Redeb.
- Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 3 Tahun 2020 tanggal 30 Januari 2020 tentang Pembangunan Perkebunan Berkelanjutan. Tanjung Redeb.
- Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 7 Tahun 2018 tanggal 28 Agustus 2018 tentang Pembangunan Perkebunan Berkelanjutan. Samarinda.
- Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 12 Tahun 2021 tanggal 24 April 2021 tentang Kriteria Area Dengan Nilai Konservasi Tinggi. Samarinda.
- Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 26 Tahun 2018 tanggal 23 Juli 2018 tentang Aksi Inspiratif Warga Untuk Perubahan Dalam Pendampingan Pembangunan Desa. Samarinda.
- Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 43 Tahun 2021 tanggal 1 November 2021 tentang Pengelolaan Area Dengan Nilai Konservasi Tinggi Di Area Perkebunan. Samarinda.
- Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 52 Tahun 2018 tanggal 7 Desember 2018 tentang Pembentukan Forum Komunikasi Perkebunan Berkelanjutan. Samarinda.
- Tiza Mafira.dkk.2019. Dari Menambang ke Menanam: Transisi Ekonomi Berkelanjutan untuk Berau, Kalimantan Timur. Climate Policy Initiative. Berau
- Tiza Mafira.dkk.2018. Menuju Rantai Pasok Kelapa Sawit yang Lebih Berkelanjutan dan Efisien di Berau, Kalimantan Timur. Climate Policy Initiative. Berau



Konservasi
Alam Nusantara
Untuk Indonesia Lestari



IKI
INTERNATIONAL
CLIMATE INITIATIVE

